

**MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KUA
SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh

MUHAMMAD RUSLI
NIM. 160 140 37

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1440 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Mahar Pigura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten
Kotawaringin Timur

Ditulis Oleh : Muhammad Rusli

NIM : 16014037

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program Studi
Magister Hukum Keluarga (MHK)



Palangka Raya, Nopember 2018

Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Sardimi, M. Ag.
NIP. 196801081994021001

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL : MAHAR FIGURA PERSPEKTIF
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NAMA : MUHAMMAD RUSLI
NIM : 16014037
JENJANG : STRATA 2
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Palangka Raya, Nopember 2018
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag
NIP. 197704132003121003

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si.
NIP.196311091992031004

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Mahar Pigura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur** oleh Muhammad Rusli NIM. 16014037, telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Tesis Pascasarjana *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya* pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 28-Desember-2018
Palangka Raya,

TIM PENGUJI

1. **Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si**

(.....)

Ketua Sidang

2. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**

(.....)

Penguji Utama

3. **Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag**

(.....)

Penguji Utama II

4. **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**

(.....)

Sekretaris



Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya

Dr. H. Sardimi, M. Ag
NIP. 19680108199402001

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا.^{3(٤)}

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁴



³Q.S. An-Nisa [4] : 4

⁴Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005, h.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

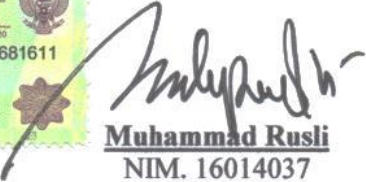
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **Mahar Figura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan,

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Nopember 2018

Yang membuat Pernyataan




Muhammad Rusli
NIM. 16014037

MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk ketentuan hukum mahar pigura dalam perspektif Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap hukum mahar dalam bentuk pigura dan alasan hukum masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama terhadap mahar dalam bentuk pigura yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian secara cermat ke lapangan (lokasi penelitian) kemudian didukung dengan pendekatan normatif yang berguna meliputi asas-asas hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar pigura dalam perspektif Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur ialah; *Pertama*, mahar dalam bentuk pigura, dinilai berbeda-beda oleh Kepala KUA itu sendiri, ada yang mendukung, antara setuju dan tidak setuju, bahkan ada yang tidak mendukung mahar ini dijadikan sebagai mahar karena berbeda dalam memahami arti asas manfaat mahar itu sendiri. Hal ini disebabkan mahar harus dinikmati dan mempunyai asas kemanfaatan dalam sebuah ikatan bagi mempelai istrinya apakah mahar tersebut bisa digunakan atau dinikmati oleh istrinya, sehingga dalam memandang mahar dalam bentuk pigura ini harus dilihat dari *'urf, saddu adz-dzariah*, dan asas manfaatnya dalam pernikahan itu sendiri. *Kedua*, alasan hukum KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung dan kurang setuju mahar pigura tersebut karena mahar yang berbentuk pigura harus dilihat dari nilai mahar pigura tersebut, bukan nilai piguranya. Hal ini disebabkan hukum melaksanakan mahar pigura *mubah* atau sah-sah saja karena tidak ada larangan maupun anjuran dari hukum Islam itu sendiri, asalkan mempunyai sisi manfaatnya baik seperti kenang-kenangan maupun nilai maharnya bukan piguranya, sehingga mahar pigura sah-sah saja dilakukan asalkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak mempelai dan keluarga. Adapun yang tidak mendukung adanya mahar pigura disebabkan mahar itu harus mempunyai sisi manfaat yang nyata dalam bentuk, karena mahar tersebut harus berupa harta baik uang, mobil, motor, rumah, dan yang lainnya berguna bagi istrinya dan harus mahar tersebut harus dinikmati oleh istrinya, bukan untuk dipajang atau disimpan.

Kata Kunci: Mahar pigura, perspektif, Kepala Kantor Urusan Agama.

DOWRY FRAME PERSPECTIVE HEAD OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS IN EAST KOTAWARINGIN DISTRICT

ABSTRACT

This study aims at the legal provisions of frame dowry in the perspective of the Head of the Office of Religious Affairs in East Kotawaringin Regency on the law of dowry in the form of frames and legal reasons for each Head of Office of Religious Affairs in dowry in the form of frames that are often carried out by surrounding communities.

The type of research used is a type of empirical research that is a careful study of the field (research location) and then supported by a useful normative approach covering the principles of Islamic law, legal systematics, synchronization (adjustment) of law with phenomena that occur in the field, comparison legal or legal history and are recommendations or recommendations.

The results showed that the frame dowry in the perspective of the Head of KUA in East Kotawaringin District was; *First*, dowry in the form of frames, considered different by the Head of KUA itself, there are those who support, between the same and do not agree, some even do not support this dowry as a dowry because they are different in understanding the meaning of the principle of the dowry itself. This is because the dowry must be enjoyed and have a principle of benefit in a bond for the bride whether the dowry can be used or enjoyed by his wife, so that in looking at the dowry in this frame must be seen from the 'urf, saddu adz-dzariah, and the principle of marriage itself. *Secondly*, the legal reason for KUA in East Kotawaringin District which supports and does not agree with the frame dowry is because the frame dowry must be seen from the value of the frame dowry, not the value of the frame. This is due to the law of implementing a modified or dowry frame dowry because there are no prohibitions or recommendations from Islamic law itself, as long as it has good benefits such as memories and the value of the dowry is not the arrangement, so the dowry frames are valid as long as it is appropriate agreement between the two brides and their families. As for those who do not support the existence of a frame dowry due to the dowry must have a real benefit in form, because the dowry must be in the form of good money, cars, motorbikes, houses, and other things that are useful to his wife and must be enjoyed by his wife, not to be displayed or stored.

Keywords: Dowry frame, perspective, head office religious affairs.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”**.

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad *Shalallahu‘alaihi Wa Sallam*, utusan Allah *Subhanahu Wa Ta‘ala* yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah Swt meridhai para sahabat dan tabi’in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah Swt juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Perdana sekaligus pencetus IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Bapak Dr. H. Sardimi, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Pascasarjana ke depannya agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag dan Dr. H. Abdul Helim, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah SWT membalasnya yang telah

begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.

5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Prodi MHK, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah Swt menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Sahabat-sahabat MHK 2016 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Pascasarjana baik dari MPI, MESY, dan MPAl, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt, semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, Nopember 2018
Penulis

Muhammad Rusli
NIM. 16014037

DAFTAR ISI

JUDUL	
NOTA DINAS	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 7
A. Landasan Teori	7
1. Definisi Mahar	7
2. Dasar Hukum Mahar	11
3. Macam-macam Mahar	15
4. Syarat- syarat Mahar	19
5. Sosiologi Hukum Islam dalam Perkawinan	20
6. Hikmah Mahar	22
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
A. Jenis penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30

D. Lokasi Penelitian.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data	33

BAB IV MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KANTOR

URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR..... 36

A. Gambaran Umum Penelitian.....	36
1. Geografi dan Iklim.....	36
2. Jumlah Penduduk.....	40
3. Agama dan Aliran Kepercayaan	41
4. Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur	42
B. Penyajian Data dan Analisis Hasil Penelitian Mahar Figura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur	43
1. Hukum Mahar Dalam Bentuk Figura Menurut Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kabupaten Kotawaringin Timur.....	43
1. Makna Mahar.....	44
2. Ketentuan Mahar Figura sebagai Mahar.....	49
3. Kedudukan Mahar dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur	52
1. Penolakan terhadap Mahar Figura	58
2. Setuju terhadap Mahar Figura.....	61
3. Antara Setuju dan Tidak Setuju (Netral) terhadap Mahar Figura	65
2. Alasan Hukum Masing-Masing Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Mahar dalam Bentuk Figura.....	74
a. Alasan Hukum Penolakan Mahar Figura.....	74
b. Alasan Hukum Setuju Mahar Figura	76
c. Alasan Hukum Setuju dan tidak Setuju terhadap Mahar Figura ...	80

BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	q xiv	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau ' ^{xv} arkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I

◌ُ	Dammah	ditulis	U
----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

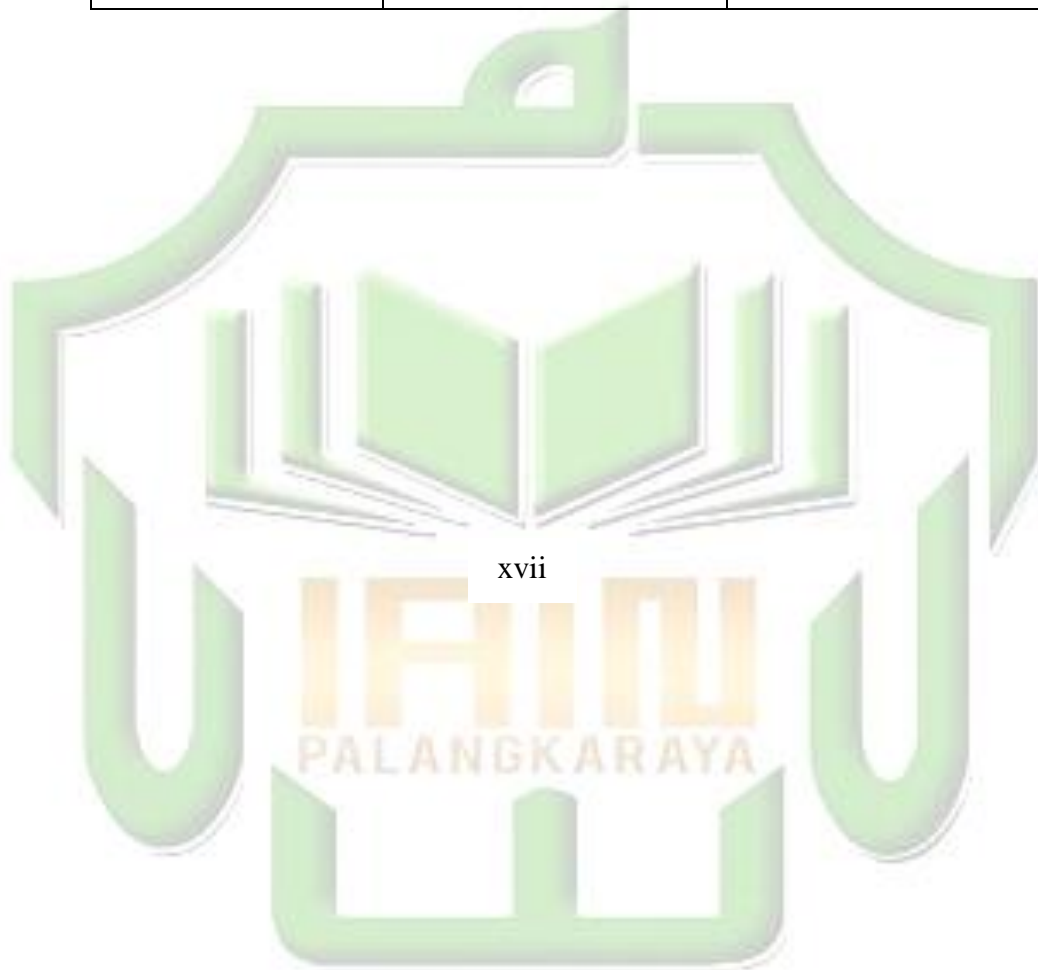
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah *Sadaq* yaitu pemberian yang berupa materi, baik berupa harta atau jasa dari seorang mempelai laki-laki kepada seorang mempelai wanita untuk dimanfaatkan menurut syara' yang dibayarkan baik dengan segera atau ditangguhkan.⁵ Menurut syariah, keharusan membayar mahar itu dibebankan kepada pihak pria bukan kepada pihak wanita.

Mahar merupakan bagian kewajiban bagi calon suami dalam perkawinan, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya dasarnya pada surah an-Nisa. ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا.⁶(٤)

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁷

Ayat Alquran di atas dapat dikatakan bahwa mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak

⁵Muhammad Asy-Syarbaini Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Babyl Halabi, t.th), h. 220.

⁶Q.S. An-Nisa [4] : 4

⁷Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, h. 142.

disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya. Mahar adalah salah satu hak istri yang bersifat material.⁸

Kalau memperhatikan tentang jumlah atau kadar mahar yang mesti diberikan oleh calon suami, maka dalam syari'at Islam sendiri tidak ditentukan tentang banyak atau sedikitnya mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat kepada sedikit atau banyaknya, secangkir kurma, sepasang sandal atau berupa pengajaran Al-Qur'an dan sebagainya, asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanitanya) sama-sama rela.⁹

Memang mengenai standar jumlah terendah dan tertingginya terjadi perbedaan. Mazhab Syafi'i seperti berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batasan angka minimalnya (terendahnya) dan tidak ada batasan jumlah maksimalnya (tertingginya), tetapi haruslah sesuai dengan kemampuan. Berlebih-lebihan dan bermahal-mahalan dalam pemberian atau permintaan mahar hukumnya adalah dimakruhkan. Alasannya karena mengingat hal itu akan menyulitkan orang-orang miskin.¹⁰ Sa'id bin Musayyab ketika mengawinkan anak perempuannya dengan mahar sebanyak dua dirham dan tidak satupun sahabat yang menentanginya. Abdurrahman bin 'Auf juga kawin

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), cet. 20, h. 54.

⁹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Bina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akapres, 2002), h. 91.

¹⁰*Ibid*, h. 93.

dengan mahar lima dirham, dan Rasulullah Saw. membiarkannya.¹¹ Bagi mazhab Hanbali, seperti yang dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa batasan di dalam pembayaran mahar itu adalah terendahnya 400 dirham dan tertinggi 500 dirham, atau kurang lebih 19 dinar.¹² Penetapan jumlah ini merupakan sunnah Rasulullah Saw., hal ini seperti jumlah mahar isteri-isteri dan anak beliau. Barangsiapa yang melakukan demikian, maka berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah Saw. dalam jumlah mahar.¹³

Hal ini berbeda di masa sekarang, di mana fakta di lapangan sekarang, khususnya dalam 2 tahun ini marak sekali pasangan pengantin yang membuat maharnya atau menyepakati maharnya dalam bentuk figura atau dalam sebuah figura. Banyak uangnya pun berbeda-beda, misalnya Rp. 100.000,-, Rp.50.000,-, Rp. 99.999,- atau 199.999,- dan lainnya. Ada yang maharnya dirangkai dalam bentuk bangunan mesjid, bentuk rumah, bentuk alat musik, bentuk burung dan lainnya yang disesuaikan dengan keinginan pasangan mempelai bersangkutan. Bentuknya yang bermacam-macam tersebut, disatu sisi memang sebuah seni dan keindahan kalau dilihat, namun disatu sisi ternyata pembuatannya kadang-kadang juga mahal. Untuk harga sebuah figurnya saja hanya mencapai Rp. 200.000,- dan belum lagi uang yang harus dikeluarkan yang kadang mahal, sebab untuk mencari uang receh sebanyak Rp. 1, sekarang ini sulit dan mahal harganya. Dengan demikian, walaupun

¹¹H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 114.

¹²Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, terj. Abu Fahmi Huadi dan Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 174.

¹³Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, terj. Rusnan Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 98.

mungkin maharnya hanya sebesar Rp. 111.111,- saja, namun harga yang dibayar calon pengantin bisa saja mencapai sekitar Rp. 500.000,- bahkan lebih. Fakta penggunaan mahar dalam bentuk figura yang dihiasi uang didalamnya dengan aneka bentuk tersebut sekarang ini hampir digunakan oleh 40% pasangan pengantin.¹⁴ Berbagai macam figura menimbulkan perbedaan di kalangan kepala KUA, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ada yang sependapat ada yang tidak sependapat tentang mahar figura ini.

Peneliti meneliti lebih dalam tentang mahar pigura menurut pendapat 13 Kepala KUA di wilayah Kabupaten Kotawaringin timur tersebut, yang hasilnya penulis uraikan lebih mendalam lagi pada sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis untuk program pascasarjana, dengan judul: **“Mahar Figura Perspektif Kepala KUA Se-Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana hukum mahar dalam bentuk figura menurut perspektif Kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana alasan hukum masing-masing kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura?

¹⁴Observasi awal terhadap pelaksanaan akad nikah menggunakan mahar figura di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 24 April 2018.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan hukum mahar dalam bentuk figura menurut perspektif Kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Mendeskripsikan alasan hukum masing-masing kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentang masalah mahar dalam bentuk fpgura menurut perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Memberikan manfaat dan kontribusi terhadap khasanah keilmuan dalam bidang fiqh munakahat pada khususnya, dan keilmuan syari'ah pada umumnya.
2. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan untuk umat Islam.
3. Untuk mengetahui pola pemikiran para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan kegelisahan akademik peneliti yang menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Kegelisahan akademik ini kemudian difokuskan dalam dua poin utama, bagaimana pandangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura ditinjau dari hukum Islam.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini mengkaji tentang ulasan pertama yaitu Landasan Teori yang membahas tentang definisi mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, sosiologi hukum Islam dalam perkawinan dan hikmah mahar, *kedua* Penelitian terdahulu yang relevan dan ketiga Kerangka Pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini mengemukakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, alasan-alasan akademik dan sosiologis pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi sekaligus sebagai validitas data yang didapat.

Bab IV Mahar Figura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Kotawaringin Timur, pada bab ini peneliti menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, menguraikan temuan hasil lapangan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan pembahasan yaitu analisis penelitian terhadap temuan yang dikumpulkan.

BAB V Penutup, yaitu pada bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, dan memberikan saran terkait dengan permasalahan pemberian mahar dalam bentuk figura.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin.¹⁵

Dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر.¹⁶ Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterikan.¹⁷

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).¹⁸

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada

¹⁵M. Ahmad Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 36.

¹⁶Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, h. 462.

¹⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, h. 294.

¹⁸Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, h. 60

waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.¹⁹

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁰

Menurut Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau wathi' (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.²¹

Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.²²

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam

¹⁹H.S.Aal-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, h.110.

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990, h.76.

²¹Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tth, h.70.

²²Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992, h.50

akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”.²³ Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Ulama²⁴ fiqih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

هُوَ الْمَالُ يُجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِي مُقَابَلَةِ
الْبِضْعِ

Artinya: “Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.²⁵

- b. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”. Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 5242.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h.. 254.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 85.

- c. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.
- d. Mazhab Syafi‘i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷ Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.²⁸

Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang bersifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan.²⁹

Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, h. 1042.

²⁷Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 1.

²⁸*Ibid.*, h. 9

²⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 1043

melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.³⁰

Dr. Hamuda dalam bukunya *The Family Structure in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud. Apabila diperhatikan, pengertian-pengertian mahar di atas maka dengan disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا.³¹(٤)

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³²

³⁰Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 78

³¹Q.S. An-Nisa [4] : 4

³²Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, h. 141

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Pada dasarnya agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبْيَنٌ.³³

Artinya :“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.³⁴

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sebagaimana Sabda Rasul:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

³³Q.S. An-Nisa [4] : 20

³⁴Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an...*, h. 146.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَانْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَاظْطُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (صحيح البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata:

"Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an." (Shahih Bukhari 4642).³⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting, maka setiap mempelai laki-laki wajib memberi mahar sebatas kemampuannya.

Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

3. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil* yang akan dipaparkan berikut:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *sighat* akad.³⁶ Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan

³⁵Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tth, h. 464.

³⁶Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, h. 110.

oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.³⁷

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama³⁸ apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar.²⁴ Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

- 1) Suami telah menggauli istri.
- 2) Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan *syar'i* bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan

³⁷*Ibid.*

seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan seluruhnya.³⁸

عَنْ زَائِدَةَ بِنِ أَبِي أَوْفٍ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِ
يُؤْنَ أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابُ وَادْحَى اسْتَرِي فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقُ
(رواه ابو عبده)

Artinya : “Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar”.(H.R. Abu ‘Abidah).³⁹

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.⁴⁰

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي
بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.⁴¹

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.⁴²

³⁸Ibid., h. 111

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyyah, Juz II, t.th, h, 161.

⁴⁰Ibid., h. 72.

⁴¹Q.S. Al-Baqarah [2] : 237

⁴²Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an...*, h. 69.

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama. Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma* dibagi menjadi dua. Pertama mahar yang segera diberikan kepada istri. Kedua, mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak

b. Mahar Mitsil

Menurut kitab Fathul Mu'in, mahar mitsil didefinisikan:

وَهُوَ مَا يَرِغِبُ بِهِ عَادَةٌ فِي مِثْلِهَا نِسْبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ
عُصْبَاتِهَا، فَتَقْدِمُ اخْتًا لِأَبَوَيْنِ فَلَا بَ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ.⁴³

Artinya : “Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama. untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah:

مَهْرُ الْمِثْلِ هُوَ الْمَهْرُ الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرِ مَنْ
يُمَاتِلُهَا وَقَدْ الْعَقْدُ فِي السِّنِّ وَالْجَمَلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالِدَيْنِ
وَالْبَكَارِ وَالْبَلَدِ وَكُلُّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الصِّدَاقُ.⁴⁴

Artinya : “Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berdeda pula maharnya”.

⁴³Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Darul Ikhyat Kutub Al-'Arabiyyah, tth, h. 108

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 75.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ قَالَ مُعَقِّلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِهِ بِرَوْعٍ بُنْتُ وَاشِقٍ⁴⁵

Artinya : “Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan belum menentukan maharnya, lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah menentukan dengannya kepada Birwa“ binti Wasyiq”.

4. Syarat- syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai,

⁴⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, Bandung: Al-Ma’arif, h. 63

karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam.

Itu adalah haram dan tidak berharga.

- c. Mahar bukan barang *ghosob*. *Ghosob* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghosob* tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah.
- d. Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.⁴⁶

5. Sosiologi Hukum Islam dalam Perkawinan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, tetapi dalam hidupnya ia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain, ia ingin selalu bersama dengan yang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di dunia.

Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum. Oleh karena itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang Nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-

⁴⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h. 87-88.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan.⁴⁷

Perkawinan merupakan penyatuan masing-masing sifat, pola pikir dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu di dalam kehidupan berkeluarga, selalu ada permasalahan atau konflik yang terjadi diantara pasangan suami istri. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri maka dapat menyebabkan berakhir dan putusnya ikatan perkawinan yang disebut dengan perceraian. Dalam Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara disebutkan sebab berakhirnya perkawinan.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif sosiologis perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.⁴⁸ Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.⁴⁹

⁴⁷Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.1

⁴⁸Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, h. 37

⁴⁹*Ibid.*, h. 38.

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung negara.

6. Hikmah Mahar

Berikut ini beberapa hikmah mahar menurut Yusuf Al-Qardawi :

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah

jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan disisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini peneliti uraikan beberapa penelitian terkait dengan mahar perkawinan sebagai berikut:

1. Harijah Damis, melakukan penelitian dengan judul “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqh Dan Per-UU” tahun 2016.

Penelitian ini melakukan kajian pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/ AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi.

Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi.

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995, h. 478.

Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.⁵¹

2. Aris Nur Qadar Ar Razak melakukan penelitian tesis dengan judul “Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)” Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Hukum Islam, Yogyakarta tahun 2015.

Tesis ini mengkaji tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Masalah akademik dari pemilihan topik ini adalah kedudukan mahar dalam fikih munakahat adalah sebagai syarat sah perkawinan. Namun demikian, hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum Islam? kedua apa nilai-nilai yang terkandung

⁵¹Harijah Damis, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan”, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016: 19 - 35

pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna? ketiga, bagaimana respon masyarakat terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna?

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Muna dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis gunakan teori akomodasi hukum yang dipertegas dengan teori *receptie in complexu* dan *receptie*. Hasil penelitian menyatakan bahwa:

- a. Praktek mahar perkawinan adat Muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan kaomu (bangsawan) dengan 20 boka, golongan walaka (adat) dengan 10 boka 10 suku, golongan anang kolaki (pertanian) dengan 7 boka dan 2 suku dan golongan maradika dengan mahar 3 boka dan 2 suku. Penetapan mahar dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna bertentangan dengan Hukum Islam. Pembahasan mahar dan bentuk serta kategori mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam.
- b. Nilai yang terkandung pada praktek mahar perkawinan adat Muna, yaitu nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan masyarakat Muna. Nilai musyawarah terdapat dalam prosesi penetapan mahar. Nilai ekonomis dan kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar yang menggunakan kain penutup.
- c. Dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu: kelompok konservatif

(mempertahankan praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar).

Faktor yang melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Selanjutnya, teori *receptie in complexu*, yang menyatakan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pada masyarakat Muna. Sementara, pada tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum adat yang lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar perkawinan adat Muna, justru berlaku teori *receptie*. Oleh karena itu, untuk dapat diakomodasi dalam membentuk fikih nasional, maka praktek mahar dalam perkawinan adat Muna terlebih dahulu mereduksi aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.⁵²

3. Miftahul Jannah, melakukan “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur’an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat” Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2016.

Saat ijab qabul dalam perkawinan mahar akan disebutkan berupa apa dan berapa jumlah atau besarnya. Makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam menjaga kemuliaan peristiwa suci atau perkawinan. Mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur’an masih terjadi pada masyarakat kita, mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an dalam hadits merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu

⁵²Aris Nur Qadar Ar Razak, “Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)” Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Hukum Islam, Yogyakarta tahun 2015, h. viii

yang dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu hanya sebuah cincin dari besi.

Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, Apakah faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an?, Bagaimana hukum mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam tinjauan Fiqh Munakahat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier kemudian data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab mahar perkawinan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dilatarbelakangi dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut yang akan menikah. Selain faktor ekonomi yang tidak cukup mampu untuk membayar mahar, menjadi suatu gengsi tersendiri yang sebagai kebiasaan baru dalam perkawinan yang maharnya menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an untuk tampil beda dari perkawinan pada umumnya di masyarakat. Mahar dengan hafalan ayat Al-Qur'an untuk saat ini belum sesuai dengan fiqh munakahat, hendaklah mahar mempunyai nilai berharga atau manfaat sehingga dapat mengangkat derajat kaum wanita.⁵³

⁵³Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat" Tesis Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016, h. vii

Berdasarkan beberapa data penelitian yang telah peneliti kumpulkan mengenai mahar, maka dapat peneliti ditegaskan bahwa penelitian sebelumnya dan peneliti yang akan peneliti lakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu: Sama-sama melakukan kajian tentang Mahar dan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menegaskan pada bentuk mahar yaitu figura.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *empiris* yaitu suatu penelitian secara cermat ke lapangan (lokasi penelitian). Dalam istilah penelitian hukum, disebut dengan penelitian *socio-legal*. Sabian Utsman terkait penelitian *socio-legal* mengatakan bahwa:

Penelitian hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analisis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio-legal research*. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio-legal*) yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*), maka penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian sosiologi hukum, dalam hal mana juga berusaha melakukan antara lain “*theory building*”.⁵⁴

Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, guna mendapatkan informasi mengenai pandangan atau pendapat para kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin timur terhadap mahar dalam bentuk figura.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sebab pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan,

⁵⁴Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3.

perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi.⁵⁵

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat menilai realita dan aspek gejala sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, apakah ketentuan tersebut baik atau buruk, dalam hal ini mengetahui: pertama, Bagaimana sudut pandangan para kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perspektif kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura?

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Adapun dalam permasalahan tesis yang peneliti angkat maka data primer adalah para kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur yang berjumlah 13 Kepala KUA.

⁵⁵Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", Minggu, 28 Februari 2010, h. 3-4

- 1) Kepala KUA Kecamatan Antang Kalang (Ahmad Qusairi, S.H.I)
- 2) Kepala KUA Kecamatan Baamang (Ahmad Mulyadi, S.H.I)
- 3) Kepala KUA Kecamatan Bapinang (Syarif Hadiani,S.Sos.I)
- 4) Kepala KUA Kecamatan Cempaga (Suriansyah,S.Ag.)
- 5) Kepala KUA Kecamatan Cempaga Hulu (Maskuni,S.Ag.)
- 6) Kepala KUA Kecamatan Kota Besi (Achmad Junaidi,S.H.I)
- 7) Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang (Marzuki,S.Ag,M.H.I)
- 8) Kepala KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Achmad Fahri,S.Ag.)
- 9) Kepala KUA Kecamatan Mentaya Hilir Utara (Muh.Fathoni,S.H.)
- 10) Kepala KUA Kecamatan Parenggean (Mohamad Yusuf,S.Sos.I)
- 11) Kepala KUA Kecamatan Seranau (Muhamad Ikhlas,S.Ag)
- 12) Kepala KUA Kecamatan Telawang (Anwar,S.Pd.I)
- 13) Kepala KUA Kecamatan Teluk Sampit (Ahmad Fauzianur,S.Th.I)

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁶

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Peneliti pilih berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat yaitu mahar

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

dalam bentuk figura menurut pandangan para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu Kabupaten/ Kota di provinsi Kalimantan Tengah praktek penggunaan mahar dalam bentuk figura sangat sering terjadi.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin timur dengan panduan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Adapun pertanyaan dalam wawancara ini yaitu terkait dengan:

- 1) Hukum mahar dalam bentuk figura menurut perspektif Kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur.
- 2) Alasannya hukum masing-masing kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap mahar dalam bentuk figura.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian

sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.⁵⁷ Dengan demikian, studi pustaka pada tesis ini faktor penambah ilmu bagi peneliti sendiri untuk menambah dasar hukum tentang mahar figura dan memadukannya dengan pendapat kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

c. Dokumentasi

Sebagai metode ilmiah dokumentasi berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait dengan data penelitian. Dokumentasi di sini khususnya berkaitan dengan mahar dalam bentuk figura. Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi yaitu:

- 1) Data-data dokumen akta nikah yang mencantumkan mahar dalam bentuk figura
- 2) Foto pelaksanaan penelitian lapangan

F. Metode Pengolahan Data

Secara umum dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penelitian tentang pandangan Kepala KUA se Kabupaten Kotawaringin Timur tentang mahar dalam bentuk figura. Sumber-sumber pengolahan data meliputi:

⁵⁷Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 97.

a. *Editing*

Editing adalah membenarkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka untuk melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.⁵⁸

b. *Classifying*

Classifying adalah melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

c. *Analysing*

Analysing adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan fokus pada masalah yang diteliti.

d. *Verifying*

Peneliti melakukan *recroos-check* atau pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Setelah data-

⁵⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 141.

data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

e. *Closing*

Setelah keempat tahapan diatas terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.



BAB IV

MAHAR FIGURA PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTIM). Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Sampit. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 16.496 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 373.842 jiwa pada tahun 2010.⁵⁹ Adapun jumlah keseluruhan Kecamatan di KOTIM berjumlah 17 Kecamatan.⁶⁰ Peneliti memaparkan mengenai gambaran umum Kotawaringin Timur berdasarkan data yang diperoleh berikut:

1. Geografi dan Iklim

a) Geografi

Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3"-113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35"-3° 18' 8" Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.679.600 ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sedangkan luas wilayah fungsi berdasarkan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 ha. Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;

⁵⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur#cite_note-bps-3, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 11:12 WIB.

⁶⁰<http://dpmptsp.kotimkab.go.id/portal/blog/2018/03/gambaran-umum-kabupaten>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 11:15 WIB.

Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;

Sebelah Selatan : Laut Jawa;

Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.

Sejak tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1

Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur:⁶¹

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Luas (Km2)	Luas Berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)
1	Mentaya Hilir Selatan	Samuda	10	318,00	21.058,1
2	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	6	610,00	66.449,4
3	Pulau Hanaut	Bapinang	14	620,00	62.515,6
4	Mentaya Hilir Utara	Bagendang	7	725,00	96.443,7
5	Mtw. Baru Ketapang	Ketapang	11	726,00	34.900,3
6	Baamang	Baamang	6	639,00	20.640,7
7	Seranau	Mentaya Seberang	6	548,00	71.115,8
8	Kota Besi	Kota Besi	11	1.889,00	63.581,2
9	Cempaga	Cempaka Mulia	8	1.253,00	88.297,1
10	Cempaga	Pundu	11	1.183,00	151.045,9

⁶¹<http://dpmptsp.kotimkab.go.id/portal/blog/2018/03/gambaran-umum-kabupaten>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 11:21 WIB.

	Hulu				
11	Parenggean	Parenggean	15	493,15	71.147,1
12	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan	16	1.712,79	131.926,2
13	Antang Kalang	Tumbang Kalang	15	1.579,00	160.402,4
14	Bukit Santuai	Tb. Penyahuan	14	1.636,00	168.005,1
15	Telawang	Sebabi	6	317,00	116.412,3
16	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	18	1.456,21	146.133,1
17	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	11	1.090,85	84.510,8
	Luas Total		185	16.796,00	1.554.584,6

b) Iklim

Kawasan Indonesia secara tahunan memiliki dua musim, yakni musim hujan (basah) dan musim kemarau (kering) yang masing-masing diselingi oleh periode-periode peralihan. Musim hujan berlangsung sejak Desember hingga Maret. Pada musim ini berhembus Muson Timurlaut yang dipengaruhi oleh massa udara Samudera Pasifik dan Benua Asia. Kondisi angin selama musim-musim itu bertiup dengan mantap dengan kecepatan rendah hingga sedang. Musim kemarau yang dipengaruhi oleh massa udara Benua Australia saat berlangsungnya Muson Tenggara terjadi sejak Juni hingga September. Selama periode peralihan, yakni peralihan awal tahun yang terjadi pada April-Mei dan peralihan akhir tahun yang berlangsung pada Oktober-Nopember, kondisi angin melemah dan menjadi tak stabil. Musim hujan dan kemarau tidak terjadi pada saat yang sama di seluruh pelosok kepulauan. Secara umum musim hujan

mempunyai sedikit lebih banyak air dan lebih sedikit sinar matahari dibandingkan dengan musim kemarau.

Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan tertinggi selama sepuluh tahun terakhir terjadi pada bulan April yaitu 443 mm sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus yaitu 83 mm. Jumlah hari hujan selama 3 (tiga) tahun terakhir (2006 – 2008), jumlah secara rata-rata tercatat sebanyak 187 hari. Bulan April merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak yaitu 22 hari. Sedangkan jumlah hari hujan terkecil terjadi pada bulan September yaitu hanya 6 hari. Suhu udara maksimum berkisar antara $31,0^{\circ}\text{C}$ – $33,8^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $21,3^{\circ}\text{C}$ – $23,4^{\circ}\text{C}$, kelembaban udara sekitar 85,58%. **(BMG Kab. Kotim, 2008)**. Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun periode kering kawasan Kabupaten Kotawaringin Timur berlangsung tidak selama periode basah. Kalau dilihat yang terjadi dari tahun 2002-2006 Juli-Oktober saja, yaitu berkisar 1-67 mm. Dimana selama sepuluh tahun terakhir maka yang menjadi bulan terkecil curah hujannya terjadi pada Agustus, sebanyak 83 mm.

Dengan demikian, kondisi curah hujan yang demikian menjadikan kawasan Kabupaten Kotawaringin Timur tergolong sebagai kawasan yang

cukup basah. Relatif lebih lamanya periode basah dibandingkan dengan periode kering menjadikan pasokan air tawar yang menuju ke badan-badan perairan, khususnya badan perairan laut pun menjadi relatif lebih berlimpah. Fenomena seperti ini memungkinkan salinitas estuari Kumai hampir pasti terjaga pada derajat payau di sepanjang musim, kecuali di tempat-tempat terjadi pertukaran air laut-air tawar yang kuat, seperti di sekitar mulut estuari.⁶²

2. Jumlah Penduduk

Pada 2010 data penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur ± 373.842 jiwa, terdiri dari :

Laki-laki = 197.213 jiwa.

Perempuan = 176.629 jiwa.

Adapun jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah.⁶³

Tabel 2

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2010)
1.	Teluk Sampit	8.929
2.	Mentaya Hilir Selatan	20.803
3.	Mentaya Hilir Utara	15.774
4.	Pulau Hanaut	15.442
5.	Mentawa Baru Ketapang	76.616
6.	Baamang	51.430
7.	Seranau	9.582
8.	Kota Besi	15.011

⁶²<http://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html?showall=1&limitstart=>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 12:45 WIB.

⁶³<http://bappeda.kotimkab.go.id/index.php/2015/06/09/kabupaten-kotawaringin-timur/>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 12:48 WIB. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Tualan_Hulu,_Kotawaringin_Timur, di akses pada hari Kamis 6 September 2018, jam 12:50 WIB.

9.	Cempaga	19.119
10.	Cempaga Hulu	22.725
11.	Parenggean	35.706
12.	Mentaya Hulu	28.554
13.	Antang Kalang	28.753
14.	Bukit Santuai	8.040
15.	Telawang	16.863
16.	Telaga Antang	
17.	Tuluan Hulu	42.49
	Jumlah:	416.332

3. Agama dan Aliran Kepercayaan

Rincian jumlah data penduduk di Kota Palangka Raya berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAAN PER KECAMATAN TAHUN 2016

Kecamatan	Agama 2016						
	Islam	Kristen Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Kong Hu Cu	Lainnya
Mentaya Hilir Selatan	26506	76	40	1	73	3	1
Teluk Sampit	11385	7	3	-	-	-	11
Pulau Hanaut	21100	60	7	-	1	-	-
Mentawa Baru/Ketapang	92590	5039	1628	235	1053	73	13
Seranau	12284	94	112	8	5	-	-
Mentaya Hilir Utara	14866	384	366	690	1	-	-
Kota Besi	16890	831	400	299	5	-	-
Telawang	9407	1369	1196	3574	16	-	-
Baamang	63838	3578	821	239	93	16	-
Cempaga	19341	708	395	434	-	-	-
Cempaga Hulu	12276	2530	537	4563	6	-	1
Parenggean	22870	1242	597	404	16	3	2
Tualan Hulu	3311	970	945	1293	5	-	-
Mentaya Hulu	16018	1253	312	1399	2	-	-
Bukit Santuai	2164	1609	213	5239	5	-	2

Antang Kalang	5246	4003	280	2919	1	17	1
Telaga Antang	12608	1291	447	2257	1	-	1
Kotawaringin Timur	362700	25044	8299	23554	1283	112	32

4. Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 14 Kantor Urusan Agama dalam beberapa wilayah di Kecamatannya. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya 13 KUA yang peneliti dapat meneliti tentang hukum mahar pigura perspektif Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur karena masih ada KUA pemekaran masih bergabung dengan KUA induk. Adapun nama-nama KUA yang peneliti dapat meneliti, yaitu:

Tabel 4

No.	Nama-Nama KUA Se-Kabupaten Kotawaringin Timur
1.	KUA Kecamatan Antang Kalang
2.	KUA Kecamatan Baamang
3.	KUA Kecamatan Bapinang
4.	KUA Kecamatan Cempaga
5.	KUA Kecamatan Cempaga Hulu
6.	KUA Kecamatan Kota Besi
7.	KUA Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
8.	KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
9.	KUA Kecamatan Mentaya Hilir Utara
10.	KUA Kecamatan Parenggean
11.	KUA Kecamatan Seranau
12.	KUA Kecamatan Telawang
13.	KUA Kecamatan Teluk Sampit

B. Penyajian Data dan Analisis Hasil Penelitian Terhadap Mahar Pigura Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu

akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.⁶⁴ Hal ini tidak terkecuali dengan keberlakuan mahar pigura dalam perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan di jelaskan seperti berikut:

1. Hukum Mahar dalam Bentuk Pigura Menurut Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kabupaten Kotawaringin Timur

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsur yang terjadi dari suami, istri dan anak-anaknya. Sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarga.⁶⁵

Kalangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Kotawaringin Timur ada beberapa yang berbeda pendapat terhadap mahar pigura yang diminta calon mempelai perempuannya kepada calon mempelai laki-lakinya, ada yang menolak mahar pigura, ada yang antara setuju dan kurang setuju, dan ada yang mendukung/menerima mahar pigura sebagai mahar yaitu:

a. Makna Mahar

⁶⁴Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 66.

⁶⁵Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, h. 19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarip Hadiani bahwa mahar adalah pemberian wajib karena sebab pernikahan atau persetubuhan, ada juga definisi lain mengatakan bahwa mahar apapun yang sifatnya bisa untuk membeli maka dia juga bisa dijadikan sebagai sidaq. Intinya dia memiliki nilai semacam suatu penilaian,⁶⁶ sementara itu Suriansyah mengatakan bahwa mahar itu adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang bisa bermanfaat bagi pihak perempuan.⁶⁷

Ahmad Qusairi juga menambahkan bahwa mahar bukanlah aturan hukum dalam pernikahan, tetapi syarat dalam suatu pernikahan, jadi sah atau tidaknya suatu pernikahan sebelum diberikannya mahar masing-masing tergantung karena wajib adanya melengkapi syarat daripada pernikahan itu.⁶⁸ Pendapat Suriansyah sama hal dengan pendapat Maskuni di mana beliau mengatakan bahwa mahar dapat dikatakan sebagai pemberian wajib seorang calon mempelai suami kepada calon mempelai istrinya sebagai ikatan suci daripada perkawinan itu sendiri.⁶⁹

Achmad Junaidi tidak berbeda jauh dengan pandangan beberapa Kepala KUA di atas yaitu mahar dapat didefinisikan pemberian dari calon suami kepada calon istrinya, jadi mahar pigura bukan masuk hukum dan

⁶⁶Syarip Hadiani, S.Sos.I, Kepala KUA Bapinang, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 14:25 WIB.

⁶⁷Suriansyah, S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga, wawancara pada hari Selasa 06-Nopember-2018, 15:29 WIB.

⁶⁸Ahmad Qusairi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Antang Kalang, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 18:03 WIB.

⁶⁹Maskuni S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga Hulu, wawancara pada hari Rabu 7-Nopember-2018, 09:43 WIB.

syarat, melainkan mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai bentuk keseriusan si calon suami kepada istrinya tersebut.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat Marzuki di mana mahar merupakan ketentuan kaidah hukum Islam, di mana pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita yang telah di nikahnya, sebagai penghormatan kepada istrinya bahwa dia mampu memberikan nafkah sebenarnya. Lambang pemberian itu sebagai kemampuan dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya.⁷¹

Akan tetapi, ada salah satu Kepala KUA yaitu Ahmad Mulyadi, di mana beliau menyatakan bahwa mahar itu sebuah rukun dalam pernikahan, kalau mahar itu bisa berbentuk macam-macam, artinya mau berbentuk hapalan Al-Qur'an disebutkan *ilabul* ijab qabul atau uang yang dimasukan dalam pigura atau tidak dan seperangkat alat sholat maupun yang lainnya.⁷² Achamd Fachrie justru memberikan definisi mahar tersebut sebagai mas kawin atau suatu pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati, jadi dengan rasa tulus suami memberikan kepada istri untuk menimbulkan rasa kasih dan cinta bagi calon istri kepada calon suami.⁷³

⁷⁰Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

⁷¹Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

⁷²Ahmad Mulyadi S.H.I., M. H, Kepala KUA Kec. Baamang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 10:28 WIB.

⁷³Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB. Lihat Anwar, S.Pd.I, Kepala KUA Kec. Telawang, wawancara pada hari Sabtu 3-Nopember-2018, 13:03 WIB.

Ahmad Fauzianur menambahkan bahwa makna mahar merupakan sebuah pemberian seorang (calon) suami kepada (calon) istrinya sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita, maka diberilah mahar itu karena hal ini (juga) disyariatkan oleh Rasulullah dalam suatu Hadis untuk memberi mahar walaupun seutas cincin perak.⁷⁴ Makna mahar menurut Rohadi dan Muhammad Yusuf kalau di lihat secara umum merupakan pemberian calon suami kepada calon istrinya. Pemberian tersebut adalah hak kewajiban untuk si suami, tetapi tidak menjadi salah satu rukun pernikahan dan mahar itu tidak membatalkan pernikahan, hanya pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri,⁷⁵ yang bermanfaat bagi istri.⁷⁶

Jika beberapa makna mahar menurut Kepala KUA di atas di pertemukan dengan beberapa pendapat ulama, seperti bersesuaian dengan pendapat yang telah ada dalam literatur keilmuan, karena secara bahasa mahar adalah suatu benda yang diberikan seorang pria kepada seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar sering juga disebut dengan mas kawin. Adapun secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi

⁷⁴ Ahmad Fauzianur, Kepala KUA Kec. Teluk Sampit, wawancara pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 pada jam 14:25 WIB.

⁷⁵ Rohadi, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Bukit Santuai, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:07 WIB.

⁷⁶ Mohammad Yusuf, S.Sos.i, Kepala KUA Kec. Parenggean, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 15:34 WIB. Lihat Muhammad Ikhlas, S. Ag, Kepala KUA Kec. Seranau, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 14:39 WIB.

seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).⁷⁷

Imam 4 mazhab fikih mempunyai pandangan berbagai macam dalam makna mahar, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- 2) Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.
- 3) Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- 4) Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁷⁸

Oleh karena itu, dari berbagai macam pandangan KUA terhadap makna mahar itu sendiri dan secara teoretis serta pendapat ulama Mazhab fikih, peneliti dapat mengatakan mahar merupakan kewajiban seorang calon suami kepada calon istri saat akan terjadinya akad nikah baik berupa

⁷⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 84.

⁷⁸ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, h. 1042.

benda maupun jasa sebagai sesuatu yang menjadikan halalnya hubungan seksual.

Mahar bagi peneliti merupakan syarat dalam perkawinan saja bukan masuk dalam kriteria rukun pernikahan itu sendiri karena dengan alasan menjadikan mahar itu menjadi rukun perkawinan maka tentu saja menjadi nilai dari mahar itu sendiri hanya berupa materi (uang) yang begitu besar bukan berbentuk benda yang bermanfaat atau di gunakan bagi pihak istri seperti mukena, sajadah, bahkan ayat-ayat Alquran tidak bisa di jadikan mahar karena di jadikannya rukun⁷⁹.

Dengan demikian, mahar merupakan syarat bagi peneliti karena yang mahar ini hanya sebagai kewajiban yang tidak hakiki yang merupakan sebuah penghormatan bagi pihak laki-laki kepada pihak perempuannya dan mahar ini atas permintaan pihak istri baik itu yang mempunyai benda yang nampak maupun benda yang tidak nampak (ayat Alquran), sehingga bagi peneliti mahar merupakan mahar bukan rukun dari perkawinan karena mahar ini bisa berbentuk apa saja yang mempunyai sifat materialitas yang jelas atas manfaatnya bukan ketentuan benda khusus yang diwajibkan dalam ketentuan mahar (rukun).

b. Ketentuan Mahar Pigura sebagai Mahar

⁷⁹Rukun bagi peneliti mempunyai ketentuan khusus atau mutlak dalam pelaksanaan sesuatu sedangkan syarat merupakan kewajiban yang bisa di lakukan asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak mesti melakukannya. Hal ini termasuk dalam mahar karena meskipun mahar tertera dalam hukum Islam (Alquran dan Hadis), tetapi mahar tidak ada ketentuan yang begitu mutlak apakah dia berbentuk benda atau tidak, sehingga mahar merupakan syarat bukan rukun dalam sebuah pernikahan.

Dalam penjelasan sebelumnya, mahar merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, tidak memandang piguranya tetapi isi dari pigura itu. Selama itu berharga dan nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh calon pengantin perempuan maka hukum mahar pigura bagi pengantin itu sendiri boleh saja,⁸⁰ dengan cara nilai mahar piguranya disebutkan waktu ijab qabul seperti maharnya Rp. 500.000 dan piguranya Rp. 350.000, maka saat ijab qabul disebutkan maharnya menjad Rp. 850.000.⁸¹

Ketentuan hukum mahar pigura tersebut atas dasar Hadis Nabi yang mengatakan “berilah mahar kepada istrimu walaupun hanya seuntai cincin besi”. Perkataan Nabi mempunyai makna bahwa mahar itu berarti wajib.⁸² Manfaat mahar pigura itu sendiri mungkin secara tidak langsung memang ada sebagai hiasan rumah dan sebagainya, cuman manfaatnya kembali ke umum (definisi mahar itu sendiri).⁸³

Ada salah satu Kepala KUA tidak menyetujui mahar pigura ini karena baginya mahar pigura bagi kedua mempelai itu tidak sesuai dengan tujuan mahar dalam pemberian seorang suami kepada seorang istri, di mana tujuan mahar itu adalah kemampuan seorang suami kepada istrinya untuk memberi sesuatu supaya dinikmati oleh si wanita tersebut. Mahar yang berupa pigura tersebut akan dijadikan hiasan saja, artinya tidak dapat

⁸⁰Ahmad Qusairi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Antang Kalang, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 18:03 WIB.

⁸¹Ahmad Mulyadi S.H.I., M. H, Kepala KUA Kec. Baamang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 10:28 WIB.

⁸²Maskuni S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga Hulu, wawancara pada hari Rabu 7-Nopember-2018, 09:43 WIB.

⁸³Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

dimanfaatkan oleh mempelai perempuan, kalau ditinjau dari segi manfaat memang tidak ada manfaatnya sebenarnya bagi mempelai perempuan, jadi manfaat mahar pigura hanya sebagai kenang-kenangan saja.⁸⁴

Akan tetapi, jika melihat pernyataan Kepala KUA yang menolak mahar pigura tersebut, ditakutkannya akan menyebabkan perselisihan masyarakat karena bagi peneliti mahar akan batal perkawinannya apabila tanpa mahar. Mahar pigura adalah suatu kewajiban, karena Imam Syafi'i mengatakan mahar itu adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang calon suami kepada perempuan dan untuk menguasai seluruh anggota tubuhnya. Kewajiban itu harus kita (laki-laki) berikan, sebelum kita menggaulinya atau menguasai seluruh anggota badannya. Hal ini pun dinyatakan oleh Rasulullah bahwa syarat di luar ketentuan Allah adalah batal.⁸⁵

Dengan demikian, mahar merupakan kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya meskipun mahar tersebut berbentuk pigura atau hiasan,⁸⁶ karena dalam segi manfaatnya tergantung kedua belah pihak masing-masing, kalau rata-rata secara ekonomi orang-orang kalangan menengah ke atas yang menggunakan mahar berbentuk pigura. Hal ini

⁸⁴Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

⁸⁵Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB.

⁸⁶Mohammad Yusuf, S.Sos.i, Kepala KUA Kec. Parenggean, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 15:34 WIB.

terbukti ketika mereka melaksanakan pernikahan itu baik dari segi pakaian, sajian makanan, dan lainnya.⁸⁷

Mahar pigura kalau dilihat dari asas kemanfaatannya boleh-boleh saja, karena mahar ini mungkin sebagai kenang-kenangan bagi calon istrinya dan menjadi suatu kebahagiaan yang mungkin akan bermanfaat kedepannya nanti.⁸⁸ Mahar yang meminta calon pengantin perempuannya, kalau yang diminta mahar pigura maka mahar pigura, kalau yang diminta berupa uang maka maharnya uang, karena yang berhak meminta dan menentukan mahar tersebut ialah pengantin perempuannya, jadi pengantin laki-laki tidak berhak untuk menentukan mahar itu sesuai keinginan calon mempelai laki-lakinya. Intinya mahar pigura ini sesuai dengan permintaan perempuannya seperti itu tidak apa-apa (sah-sah saja) maka mahar pigura boleh atau sah-sah saja.⁸⁹

Ketentuan mahar pigura sebagai mahar tentu memiliki asas manfaatnya karena mahar pigura asas manfaat ini tergantung dari penilaian pihak istri yang meminta mahar dalam bentuk pigura, sehingga mahar pigura bagi peneliti sendiri memiliki asas manfaat secara personal bagi pihak istri meskipun secara kasat mata mahar pigura tidak mempunyai asas manfaat yang begitu signifikan, tetapi mahar pigura berguna bagi

⁸⁷ Muhammad Ikhlas, S. Ag, Kepala KUA Kec. Seranau, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 14:39 WIB.

⁸⁸ Anwar S.Pd.I, Kepala KUA Kec. Telawang, wawancara pada hari Sabtu 3-Nopember-2018, 13:03 WIB.

⁸⁹ Ahmad Fauzinur, Kepala KUA Kec. Teluk Sampit, wawancara pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 pada jam 14:25 WIB.

kenang-kenangan dalam kehidupan rumah tangga dan mahar pigura boleh berupa benda yang tidak asli saat ijab qabul.

c. Kedudukan Mahar dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur

Kedudukan mahar pigura dalam data wawancara dengan 13 Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai karakteristik masing-masing dalam memberikan hukum mahar pigura tersebut, seperti pendapat Maskuni yang mengatakan bahwa mahar pigura kalau menurut aturan hukum Islam baik dalil Alquran maupun Hadis tidak ada, tapi hukumnya boleh saja. Mahar pigura ini hanya adat/kebiasaan, maka boleh saja asalkan tidak menyalahi dari Syari'at Islam.⁹⁰ Pendapat Maskuni di dukung oleh Anwar karena memang mahar yang berbentuk pigura tidak ada bertentangan dengan hukum nikah itu sendiri karena kalau memang tidak mampu dengan cincin besi pun bahkan dengan mengucapkan dengan kalimat dua syahadat boleh menjadi mahar. Mahar pigura boleh-boleh saja apapun bentuk maharnya, asalkan telah disepakati oleh mereka berdua boleh-boleh saja hukumnya.⁹¹

Pendapat kedua kepala KUA tersebut di dukung oleh Ahmad Qusairi di mana beliau mengatakan bahwa mahar pigura dibolehkan saja,⁹² karena Ahmad Mulyadi juga mengatakan bahwa mahar yang berbentuk

⁹⁰Maskuni S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga Hulu, wawancara pada hari Rabu 7-Nopember-2018, 09:43 WIB.

⁹¹Anwar S.Pd.I, Kepala KUA Kec. Telawang, wawancara pada hari Sabtu 3-Nopember-2018, 13:03 WIB.

⁹²Ahmad Qusairi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Antang Kalang, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 18:03 WIB.

pigura bagus karena sebagai hiasan walaupun mahar itu sebaiknya atau disunahkan harus digunakan atau dinikmati pihak istri.⁹³

Suriansyah dan Syarip Hadiani lebih detail dan rinci dalam memberikan kedudukan mahar pigura, di mana mereka mengatakan bahwa ada berbagai macam persepsi tentang mahar pigura ini karena yang namanya mahar itu harus dimanfaatkan. Mahar pigura apabila berbentuk permanen maka ada nilai yang sama dengan jumlah yang ada harus diserahkan kepada pihak perempuan yang dinikahi. Alasannya mahar itu harus dimanfaatkan baik berbentuk uang yang harus diserahkan terserah nilainya berapa tetapi harus digunakan, tetapi kebanyakan memang dalam hukum ada yang menggunakan mahar pigura yang berbentuk uang recehan yang jumlahnya Rp. 250.000 lalu dibentuklah semacam logo hati dan itu sifatnya permanen,⁹⁴ cuman yang menjadi permasalahan ialah saat ijab qabul tidak di sebutkan nomial mahar pigura tersebut.⁹⁵

Muhammad Ikhlas juga menambahkan bahwa semua tentang kedudukan mahar pigura tidak ada permasalahan dan tidak ada larangan seperti apa seharusnya, bentuk, dan tempatnya seperti apa tidak pernah diatur dalam agama kita, justru itu terlihat cantik ketika diserahkan kepada istri setelah ijab qabul.⁹⁶ Mahar yang berbentuk pigura juga di katakana

⁹³Ahmad Mulyadi S.H.I., M. H, Kepala KUA Kec. Baamang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 10:28 WIB.

⁹⁴Suriansyah, S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga, wawancara pada hari Selasa 06-Nopember-2018, 15:29 WIB.

⁹⁵Syarip Hadiani, S.Sos.I, Kepala KUA Bapinang, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 14:25 WIB.

⁹⁶Muhammad Ikhlas, S. Ag, Kepala KUA Kec. Seranau, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 14:39 WIB.

oleh tidak ada bertentangan dengan hukum nikah itu sendiri karena kalau memang tidak mampu dengan cincin besi pun bahkan dengan mengucapkan dengan kalimat dua syahadat boleh menjadi mahar. Mahar pigura boleh-boleh saja apapun bentuk maharnya, asalkan telah disepakati oleh mereka berdua boleh-boleh saja hukumnya.⁹⁷

Ahmad Fauzianur menambahkan mahar yang berbentuk pigura sah-sah saja (tidak apa-apa), tetapi alangkah baiknya dalam rangka memberikan penghargaan kepada seorang wanita, carilah mahar itu yang lebih bermanfaat bagi dirinya (wanita). Nilai manfaat itu yang kita cari, karena mahar itu merupakan sebuah pemberian yang sifatnya menghargai seorang perempuan. Alangkah lebih baiknya mahar tersebut bermanfaat bagi dirinya (perempuan).⁹⁸

Akan tetapi, ada Kepala KUA yang antara setuju dan tidak setuju terhadap kedudukan mahar pigura, seperti yang di katakan oleh Achmad Junaidi mengatakan bahwa mahar berbentuk pigura selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Kota Besi memang selalu ada, kalau menurut pandangan beliau sendiri mahar pigura itu terlebih dahulu beliau tanyakan kepada kedua mempelainya saat akad nikahnya. Waktu pembinaan saya tanya juga, si calon atau mempelai suami saya tanyakan maharnya diminta apa dan dia jawab seperangkat alat sholat, lalu beliau tanyakan kepada calon/mempelai perempuan kalau seperangkat alat sholat itu apakah

⁹⁷Rohadi, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Bukit Santuai, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:07 WIB.

⁹⁸Ahmad Fauzianur, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Teluk Sampit, wawancara pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 pada jam 14:25 WIB.

mukena atau ditambah sajadah, tasbih, dan Alquran. Beliau juga menjelaskan kalau Alquran tidak boleh dijadikan mahar, kecuali mukena, sajadah, dan tasbih boleh saja dijadikan mahar, tetapi diperjelas mukena itu berbentuk atas bawahan atau langsung (ada yang minta langsung ada juga yang minta atas bawahan). Mahar pigura rata-ratanya berbentuk uang, waktu pemeriksaan (bimbingan) dia tidak menyebutkan mahar pigura itu, berapa mahar yang saudara minta, lima puluh ribu atau seratus ribu pak di waktu pemeriksaan. Di sepakatilah apakah mempelai laki-laki mampu uang Rp. 100.000 dan mempelai pria menyanggupi, maka kita bilang tunai. Ternyata setelah akad nikah, mahar tersebut di bikin hiasan atau pigura.⁹⁹

Hal ini di dukung dengan pendapat Marzuki, di mana beliau mengatakan bahwa mahar yang berbentuk pigura perlu di pisahkan antara mahar berupa uang yang berbentuk pigura atautkah pigura itu sendiri, walaupun mahar yang dalam bentuk uang yang dikemas dalam pigura, tidak ada permasalahan karena nantinya dalam akad nikah harus disebutkan maharnya secara jelas apa dan berapanya, sehingga KUA bisa membebaskan bahwasanya mahar uang (hiasan) adalah hak dari istri dan suami tidak boleh meminta mahar tersebut kecuali dengan izin istrinya nanti.¹⁰⁰

Marzuki juga mengatakan bahwa waktu mau menikah pihak mempelai pengantin ditanya seperti mas kawin, nama, bin/binti orang tua

⁹⁹Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

¹⁰⁰Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

baik laki-laki maupun perempuan, sampai ke mahar sebelum akad nikah. Mahar yang diminta berupa uang yang dibentuk pigura seperti inilah yang menjadi permasalahan karena seharusnya mahar pigura itu dalam hukum pernikahan sebenarnya berupa uang atau apapun yang harus dimiliki dan dinikmati oleh seorang istri, tapi jikalau uang atau mahar apapun dibentuk semacam pigura ini kita bilang saudara rela atau tidak atas permintaan saudari, dia katakan atas permintaannya sendiri. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar pigura merupakan permintaan pihak perempuan.¹⁰¹

Adapun ada Kepala KUA yang menyatakan mahar pigura bahwa mahar pigura tidak di bolehkan seperti yang di katakn oleh Achmad Fahrie dan Momhammad Yusuf lebih tegas lagi menganyatakan bahwa mahar sudah sepantasnya sebagai suatu pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istri, andaikata berbentuk pigura yang bermanfaat atau tidak itu yang perlu perlu ditealaah lebih jauh lagi. Mahar jikalau berguna cuma untuk pigura atau dipajangkan di dinding, tidak menjadi masalah. Akan tetapi, mahar pigura biasanya selalu di sia-siakan, maka pemberian mahar itu tidak mempunyai harga sama sekali.¹⁰² Intinya mahar pigura kurang bermanfaat karena dia (mahar) hanya berbentuk pajangan dan tidak efek manfaatnya yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh seorang istri. Oleh karena itu, mahar tersebut tidak bisa digunakan, kalau seandainya ada

¹⁰¹Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

¹⁰²Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB.

yang mengatakan suatu saat nanti menjadi antik dan sebagainya, hal seperti itu hanya sebuah khayalan atau berandai-andai dan tidak pasti. Mahar pigura ini tidak mempunyai manfaat sama sekali karena jika menilai makna mahar itu sendiri dari segi manfaat, mahar yang berupa harta harus ada memiliki nilai manfaat kepada istri.¹⁰³

Berdasarkan ketentuan pendapat Tigabelas (13) Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap kedudukan hukum mahar pigura peneliti dapat katakana bahwa sebanyak Sembilan (9) Kepala KUA setuju terhadap mahar pigura, Dua (2) Kepala KUA antara setuju dan tidak setuju, dan ada Dua (2) Kepala KUA yang tidak setuju sama sekali terhadap kedudukan hukum mahar pigura itu sendiri karena berbagai macam alasan yang di berikan yaitu:

1) Penolakan terhadap Mahar Pigura

Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang menolak atau tidak menyetujui mahar pigura ini ada 3 KUA yaitu Kepala KUA di Kec. Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Selatan, dan Parenggean mereka menolak dan kurang setuju mahar pigura karena ada beberapa alasan bahwa mahar sudah sepantasnya sebagai suatu pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istri, andaikata berbentuk pigura yang bermanfaat atau tidak itu yang perlu perlu ditealaah lebih jauh lagi. Mahar jikalau berguna cuma untuk pigura atau dipajangkan di dinding, tidak menjadi masalah. Akan tetapi,

¹⁰³ Mohammad Yusuf, S.Sos.i, Kepala KUA Kec. Parenggean, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 15:34 WIB.

mahar pigura biasanya selalu di sia-siakan, maka pemberian mahar itu tidak mempunyai harga sama sekali.¹⁰⁴

Waktu mau menikah pihak mempelai pengantin ditanya seperti mas kawin, nama, bin/binti orang tua baik laki-laki maupun perempuan, sampai ke mahar sebelum akad nikah. Mahar yang diminta berupa uang yang dibentuk pigura seperti inilah yang menjadi permasalahan karena seharusnya mahar pigura itu dalam hukum pernikahan sebenarnya berupa uang atau apapun yang harus dimiliki dan dinikmati oleh seorang istri, tapi jikalau uang atau mahar apapun dibentuk semacam pigura ini kita bilang saudara rela atau tidak atas permintaan saudari, dia katakan atas permintaannya sendiri. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar pigura merupakan permintaan pihak perempuan.¹⁰⁵

Mahar pigura kurang bermanfaat karena dia (mahar) hanya berbentuk pajangan dan tidak efek manfaatnya yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh seorang istri. Oleh karena itu, mahar tersebut tidak bisa digunakan, kalau seandainya ada yang mengatakan suatu saat nanti menjadi antik dan sebagainya, hal seperti itu hanya sebuah khayalan atau berandai-andai dan tidak pasti. Mahar pigura ini tidak mempunyai manfaat sama sekali karena jika menilai makna mahar

¹⁰⁴ Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB.

¹⁰⁵ Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

itu sendiri dari segi manfaat, mahar yang berupa harta harus ada memiliki nilai manfaat kepada istri.¹⁰⁶

Dengan demikian, ketiga KUA yang menolak atau tidak mendukung mahar pigura secara langsung maupun tidak langsung mereka beranggapan bahwa mahar tersebut harus dilihat dari segi manfaatnya karena biasanya mahar pigura biasanya di sia-siakan saja hanya sebagai pajangan, tidak dimanfaatkan oleh pihak istri sebagai pemberian dari suaminya saat akad nikah.

Bagi peneliti Kepala KUA yang menolak atau tidak setuju terhadap mahar pigura karena kurangnya ilmu pendidikan yang sesuai dengan pemahaman mahar itu sendiri terhadap ketentuan nikah, sehingga mereka berpandangan bahwa mahar pigura tidak memiliki asas manfaat, sedangkan bagi peneliti sendiri mahar pigura memiliki asas manfaat sebagai memorialbum bagi pasangan suami-istri yang tentu saja memiliki nilai dan manfaat bagi istri bahkan suami itu sendiri dalam sisi hubungan rumah tangga bukan untuk keutamaan istri.

Hal ini di dukung dengan teori *sad ad-dzari'ah*¹⁰⁷ di mana menolak kemafsadatan lebih di utamakan daripada meraih kemaslahatan karena jika kita menolak ketentuan mahar pigura di

¹⁰⁶ Mohammad Yusuf, S.Sos.i, Kepala KUA Kec. Parenggean, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 15:34 WIB.

¹⁰⁷ *Sad Ad-Dzari'ah* terdiri dua perkara yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *dzari'ah* berarti jalan. *Saddu Ad-Dzari'ah* ialah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuannya ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 90.

takutkannya akan adanya perpecahan antar umat dan pasangan calon pengantin menganggap pernikahan sulit dilakukan sehingga mereka kemungkinan besar melakukan zina lebih besar resikonya daripada memenuhi kemaslahatan (asas manfaat mahar pigura) bagi istri.

2) Setuju terhadap Mahar Pigura

Sembilan (9) Kepala KUA Kec. Antang Kalang, Baamang, Bapinang, Cempaga, Cempaga Hulu, Bukit Santuai, Seranau, Telawang, dan Teluk Sampit yang mendukung mahar pigura mendukung adanya mahar pigura karena mereka beralasan bahwa mahar pigura dibolehkan saja.¹⁰⁸ Mahar pigura kalau menurut aturan hukum Islam baik dalil Alquran maupun Hadis tidak ada, tapi hukumnya boleh saja. Mahar pigura ini hanya adat/kebiasaan, maka boleh saja asalkan tidak menyalahi dari Syari'at Islam.¹⁰⁹

Ada berbagai macam persepsi tentang mahar pigura ini karena yang namanya mahar itu harus dimanfaatkan. Mahar pigura apabila berbentuk permanen maka ada nilai yang sama dengan jumlah yang ada harus diserahkan kepada pihak perempuan yang dinikahi. Alasannya mahar itu harus dimanfaatkan baik berbentuk uang yang harus diserahkan terserah nilainya berapa tetapi harus digunakan, tetapi kebanyakan memang dalam hukum ada yang menggunakan mahar

¹⁰⁸ Ahmad Qusairi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Antang Kalang, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 18:03 WIB.

¹⁰⁹ Maskuni S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga Hulu, wawancara pada hari Rabu 7-Nopember-2018, 09:43 WIB.

pigura yang berbentuk uang recehan yang jumlahnya Rp. 250.000 lalu dibentuklah semacam logo hati dan itu sifatnya permanen.¹¹⁰

Mahar yang berbentuk pigura bagus karena sebagai hiasan walaupun mahar itu sebaiknya atau disunahkan harus digunakan atau dinikmati pihak istri,¹¹¹ tetapi untuk mahar pigura ini tetap termasuk kedalam mahar juga karena mahar juga berdasarkan permintaan daripada calon mempelai perempuannya. Kadang calon mempelai perempuannya meminta mahar misalkan Rp. 250.000 tapi dibingkai, cuma menjadi persoalan ialah terkadang ijab qabulnya tidak disebutkan secara keseluruhan, seharusnya mahar pigura tersebut disebutkan dalam ijab qabul seperti Rp. 250.000 yang dibingkai disebutkanlah secara keseluruhan bukan disebutkan dalam bentuk nominalnya.¹¹²

Pernyataan tentang mahar pigura tidak ada permasalahan dan tidak ada larangan seperti apa seharusnya, bentuk, dan tempatnya seperti apa tidak pernah diatur dalam agama kita, justru itu terlihat cantik ketika diserahkan kepada istri setelah ijab qabul.¹¹³ Adapun mahar yang berbentuk pigura yang di masukan uang dirias sedemikian rupa agar terlihat indah, perlu di siasati dengan duplikat/fotokopian dengan menyerahkan uang duplikat/fotokopian tersebut dan

¹¹⁰Surianyah, S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga, wawancara pada hari Selasa 06-Nopember-2018, 15:29 WIB.

¹¹¹Ahmad Mulyadi S.H.I., M. H, Kepala KUA Kec. Baamang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 10:28 WIB.

¹¹²Syarip Hadiani, S.Sos.I, Kepala KUA Bapinang, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 14:25 WIB.

¹¹³Muhammad Ikhlas, S. Ag, Kepala KUA Kec. Seranau, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 14:39 WIB.

menyerahkan uang aslinya kepada mempelai istri agar bisa dimanfaatkan uang tersebut.¹¹⁴

Dengan demikian, mahar yang berbentuk pigura tidak ada bertentangan dengan hukum nikah itu sendiri karena kalau memang tidak mampu dengan cincin besi pun bahkan dengan mengucapkan dengan kalimat dua syahadat boleh menjadi mahar. Mahar pigura boleh-boleh saja apapun bentuk maharnya, asalkan telah disepakati oleh mereka berdua boleh-boleh saja hukumnya.¹¹⁵ mahar yang berbentuk pigura sah-sah saja (tidak apa-apa), tetapi alangkah baiknya dalam rangka memberikan penghargaan kepada seorang wanita, carilah mahar itu yang lebih bermanfaat bagi dirinya (wanita). Nilai manfaat itu yang kita cari, karena mahar itu merupakan sebuah pemberian yang sifatnya menghargai seorang perempuan. Alangkah lebih baiknya mahar tersebut bermanfaat bagi dirinya (perempuan).¹¹⁶

Peneliti mendukung adanya mahar pigura, karena sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa berikanlah cincin walaupun seutas besi. Hadis tersebut bagi peneliti bahwa penyerahan mahar merupakan kewajiban, namun mahar tersebut bagi peneliti nilainya tidak perlu apapun bentuknya walapun seutas cincin besi tetap menjadi kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak perempuan. Nilai tersebut

¹¹⁴Rohadi, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Bukit Santuai, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:07 WIB.

¹¹⁵Anwar S.Pd.I, Kepala KUA Kec. Telawang, wawancara pada hari Sabtu 3-Nopember-2018, 13:03 WIB.

¹¹⁶Ahmad Fauzianur, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Teluk Sampit, wawancara pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 pada jam 14:25 WIB.

bagi peneliti sendiri termasuk dalam mahar pigura, karena mahar ini bisa mempunyai nilai yang sederhana dan juga nilai yang mewah, sesuai dengan kehendak kedua mempelai perempuan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Achmad Fachrie Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, di mana beliau mengatakan supaya ada manfaatnya, KUA harus menanyakan kepada mempelai apa mahar yang diserahkan, kalau bentuknya uang asli seperti Rp. 100.000 apakah berbentuk pigura atau tidak tanyakan terlebih dahulu, maka dijelaskan terlebih dahulu kepada calon istri bahwa mahar yang berbentuk pigura tolong dihargai penghargaan suaminya karena sama seperti alat sholat, sedangkan hadis Rasulullah mengatakan bahwa berikanlah maharmu walaupun sebuah cincin perak/besi. Rasulullah tidak mengharuskan untuk menghafal Alquran, tetapi beliau menitik beratkan yang penting ada penghargaan dari pemberian suami.¹¹⁷

Mahar di sunahkan harus di nikmati atau di gunakan pihak istri karena mahar merupakan permintaan dari pihak istri, begitu pula dengan mahar pigura baik yang berbentuk uang yang di hias seindah mungkin untuk di jadikan pajangan maupun hiasan rumah. Mahar pigura merupakan adat/kebiasaan masyarakat setempat dalam kultularisasi anatar agama dan adat. Dalam ketentuan hukum Islam mahar pigura di bolehkan saja karena tidak ada larangan maupun

¹¹⁷Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB.

anjaran dari Alquran maupun Hadis terhadap ketentuan mahar pigura seperti apa bentuknya dan tempatnya.

Adapun mahar pigura yang sebaiknya di lakukan bukan dari benda asli yang di jadikan mahar, tetapi hanya fotokopi/duplikat mahar itu sendiri karena saat terjadinya ijab qabul tidak perlu adanya di perlihatkan maupun keaslian benda yang di jadikan mahar tersebut melainkan nilai mahar itu sendiri, sehingga mahar pigura bagi peneliti sendiri lebih baik bagus berupa fotokopian/duplikat saat ijab qabulnya dan yang asli di simpan dan di serahkan langsung kepada istri.

3) Antara Setuju dan tidak Setuju (Netral) terhadap Mahar Pigura

Mahar yang berbentuk pigura perlu di pisahkan antara mahar berupa uang yang berbentuk pigura ataukah pigura itu sendiri, walaupun mahar yang dalam bentuk uang yang dikemas dalam pigura, tidak ada permasalahan karena nantinya dalam akad nikah harus disebutkan maharnya secara jelas apa dan berapa, sehingga KUA bisa membebaskan bahwasanya mahar uang (hiasan) adalah hak dari istri dan suami tidak boleh meminta mahar tersebut kecuali dengan izin istrinya nanti.¹¹⁸

Achmad Junaidi mengatakan bahwa mahar berbentuk pigura selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Kota Besi memang selalu ada, kalau menurut pandangan beliau sendiri mahar pigura itu terlebih dahulu beliau tanyakan kepada kedua mempelainya saat akad

¹¹⁸Marzuki, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 08:55 WIB.

nikahnya. Waktu pembinaan beliau tanya juga, si calon atau mempelai suami beliau tanyakan maharnya diminta apa dan dia jawab seperangkat alat sholat, lalu beliau tanyakan kembali kepada calon/mempelai perempuan kalau seperangkat alat sholat itu apakah mukena atau ditambah sajadah, tasbih, dan Alquran.

Beliau juga menjelaskan kalau Al-Qur'an tidak boleh dijadikan mahar, kecuali mukena, sajadah, dan tasbih boleh saja dijadikan mahar, tetapi diperjelas mukena itu berbentuk atas bawahan atau langsung (ada yang minta langsung ada juga yang minta atas bawahan). Mahar pigura rata-ratanya berbentuk uang, waktu pemeriksaan (bimbingan) dia tidak menyebutkan mahar pigura itu, berapa mahar yang saudara minta, lima puluh ribu atau seratus ribu pak di waktu pemeriksaan. Di sepakatilah apakah mempelai laki-laki mampu uang Rp. 100.000 dan mempelai pria menyanggupi, maka kita bilang tunai. Ternyata setelah akad nikah, mahar tersebut di bikin hiasan atau pigura.¹¹⁹

Peneliti tidak sependapat dengan Kepala KUA yang kurang setuju dengan ketentuan mahar pigura yang mereka berikan karena mahar bisa saja berbentuk apapun asalkan mempunyai nilainya dan atas kehendak mempelai perempuannya. Mahar pigura mempunyai nilai lebih daripada mahar biasanya karena mahar pigura mempunyai asas manfaat untuk kebudayaan/adat istiadat. Ketentuan mahar pigura ini adalah benda yang dijadikan pigura, bukan harga dari piguranya, karena

¹¹⁹ Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

mahar tersebut harus berupa harta benda, bukan asas manfaatnya.

Mahar pigura, jika kita jadikan sebagai mahar pernikahan maka asas manfaatnya mempunyai nilai walaupun itu hanya sebatas cincin besi dan ayat-ayat Al-Qur'an seperti hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (صحيح البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata: "Wahai

Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata: "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an." (Shahih Bukhari 4642).¹²⁰

Hadis di atas bagi peneliti sebagai keberagaman mahar itu sendiri baik dari segi materi maupun non-materi karena mahar merupakan syarat sebagai bentuk penghormatan kepada calon suami kepada calon istri, sehingga mahar pigura boleh di lakukan saja asalkan bisa di manfaatkan oleh pihak istri meskipun berbentuk hiasan atau pajangan. Mahar dari hadis tersebut bahkan walau berbentuk cincin besi maupun hapalan Alquran sudah menjadi syarat dalam sebuah perkawinan, sehingga mahar pigura yang mempunyai nilai lebih besar

¹²⁰Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 464.

bagi pihak istri baik benda maupun meterealistisnya termasuk dalam mahar dan hukumnya sah-sah saja asalkan mempunyai asas manfaat dan bukan benda haram.

Perbedaan pendapat 13 Kepala KUA se-Kabupaten Kotaringin Timur terhadap mahar yang berbentuk pigura sebenarnya mempunyai perspektif mereka masing-masing, karena peneliti mengakui bahwa mahar itu merupakan sebuah kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya sebagai tanda penghormatan kepada perempuan. Akan tetapi untuk mahar pigura sendiri, peneliti mendukung atau lebih condong kepada pendapat Kepala KUA yang mendukung mahar yang dibentuk pigura atau hiasan karena kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar masih menghutang, tidak mengurai sahnya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Pasal 34 “kewajiban mahar bukan termasuk dalam pernikahan”.¹²¹

Pasal tersebut bagi peneliti sendiri merupakan kewajiban penyerahan mahar bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuannya apapun bentuknya termasuk mahar berbentuk pigura baik itu uang yang dibingkai sedemikian rupa maupun lukisan ataupun kenang-kenangan mereka, meskipun asas kemanfaatannya kurang manfaat karena mahar tersebut harus berbentuk harta atau materealistis seperti seutas cincin besi yang bisa dinikmati dan digunakan oleh istri.

¹²¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, h. 10.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami-istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai *wasilah* (perantara), bukan sebagai *ghayah* (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.¹²²

Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya.¹²³

Konsekuensi dari tidak seimbang antara norma hukum dengan realisasi hukum mahar pigura di lapangan. Perkembangan zaman tidak diimbangi dengan norma hukum, sehingga regulasi yang ada tidak dapat mengakomodir dengan holistik. Keadilan yang hakiki tidak terealisasi karena telah terjadi pergeseran nilai antara kebutuhan individual atau kebutuhan universal. Menurut Taylor, kontroversi sekitar teori keadilan tidak hanya berkenaan dengan kriteria keadilan dan apa yang dilakukan agar adil, tapi juga menyangkut pertanyaan keadilan distributif. Dilanjutkannya prinsip keadilan distributif berkaitan dengan konsepsi mengenai yang baik bagi

¹²²Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002, h.148.

¹²³Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003, h. 27.

manusia, khususnya perbedaan pemahaman mengenai posisi individu dalam masyarakat untuk merealisasikan nilai yang baik.¹²⁴

Ketentuan tersebut meskipun dilihat dari segi asas manfaatnya kurang berguna dalam bentuk realistiknya mahar sebagai pemberian kewajiban harta calon laki-laki kepada calon perempuannya selama pihak istri yang meminta mahar tersebut harus berbentuk pigura, maka boleh saja mahar yang diminta berbentuk pigura dijadikan sebagai mahar jika dilihat dalam kehidupan masyarakat. Mahar pigura tersebut dalam kehidupan sosial menjadi adat/kebiasaan yang hanya berlaku bagi masyarakat Indonesia karena tuntutan adat/kebiasaan tersebut menjadikan mahar pigura menjadi berbagai bentuk dan kategori sesuai dengan adat istiadat setempat. Hal tersebut dalam hukum Islam menjadi isyarat bahwa mahar pigura menjadi syarat yang berlaku seperti kaidah berikut:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: “Yang baik itu menjadi al-‘urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”.¹²⁵

Kaidah di atas bagi peneliti sendiri merupakan ketentuan kewajiban mahar pigura sebagai isyarat yang menjadi syarat dalam ketentuan pernikahan yang berlaku dengan adat/kebiasaan masyarakat, tetapi dalam hukum Islam tidak ada anjuran dan larangan tentang mahar pigura tersebut. Peneliti lebih memilih nilai mahar piguranya daripada bentuk dan harga piguranya, karena jika menalaah filosofi dari mahar pigura memiliki makna tersendiri bagi kedua mempelai terutama mempelai perempuan, maka hukum mahar pigura

¹²⁴Lemhanas, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.104-105.

¹²⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 142.

tersebut sah-sah saja dilakukan dan tidak ada larangan meskipun asas kemanfaatannya kurang bermanfaat.

Oleh karena itu, ketentuan hukum mahar yang berbentuk pigura bagi peneliti sah-sah saja (mubah) karena bagi peneliti mahar yang berbentuk pigura bukanlah suatu *mudharat* dalam hukum *munakahatnya*, melainkan sebuah adat atau tradisi yang diberlakukan oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk filosofi makna mahar itu sendiri dalam sebuah pernikahan asalkan tidak melenceng jauh dari hikmah dan benda mahar itu sendiri yang bermanfaat bagi istri atas kewajiban calon suami. Dengan demikian, mahar pigura merupakan adat atau tradisi yang diberlakukan oleh masyarakat, tetapi tidak mempunyai unsur dan dasar hukum (*munakahat*) yang kuat dalam melaksanakannya, sehingga bagi calon pasangan pengantin yang ingin memberlakukan mahar pigura sebagai mahar dibolehkan saja asalkan mempunyai asas manfaat dan kegunaan bagi istrinya.

2. Alasan Hukum Masing-Masing Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Terhadap Mahar Dalam Bentuk Pigura

Dalam ketentuan hukumnya, mahar pigura seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak ada larangan dan tidak ada anjuran bagi yang pihak pengantin yang melakukan mahar pigura sebagai mahar dalam perkawinan. 13 Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang berbeda pendapat dalam ketentuan hukum mahar pigura tersebut yaitu:

a. Alasan Hukum Penolakan Mahar Pigura

Mahar pigura ini karena fikih itu konsep utamanya *dar'ul mafashid dar'ul mafasidi awla min jalbilmoshalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan). Mahar pigura tidak mempunyai nilai apa-apa, maka harus didahulukan maslahahnya apakah mempunyai manfaat terhadap istrinya, di sinilah konsep fikih yang lebih menolak kerusakan mahar pigura di kemudian hari,¹²⁶ karena mahar pigura tidak dihargai dan tidak ada timbal balik dari pihak perempuan. Padahal mahar itu adalah pemberian yang wajib yaitu pemberian yang wajib yang dihargai oleh si istri kepada suami. Hal ini terkadang menjadikan mahar pigura tersebut akan luntur, sedangkan mahar itu sebagai penghargaan, apalagi saat ini banyak orang yang koleksi-koleksi uang-uang lama atau uang tahun-tahun dulu di bentuk sebgus mungkin sesuai selera, kalau pigura yang berisi uang kusang, tidak berbentuk lagi seperti berlubang, maka mahar tersebut tidak ada penghargaan atas suami.¹²⁷

Peneliti tidak menyetujui alasan hukum yang diberikan oleh ketiga Kepala KUA yang menolak mahar yang dijadikan pigura menjadi mahar dalam perkawinan, alasannya karena tidak mempunyai asas manfaat. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat

¹²⁶Mohammad Yusuf, S.Sos.i, Kepala KUA Kec. Parenggean, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 15:34 WIB.

¹²⁷Achmad Fachrie, S. Ag, Kepala KUA Kec. Mentaya Hilir Selatan, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 15:09 WIB.

subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai dan hal ini sangat kondisional.¹²⁸

Pendapat Ibnu Rusyd bagi peneliti mahar pigura merupakan mahar yang mempunyai asas manfaat yang begitu besar, selain manfaatnya untuk sebagai kenang-kenangan tapi mahar pigura juga mempunyai daya tarik dalam menjalin hubungan keluarga, di tambah dengan adat yang berlaku di masyarakat. Apabila kita menolak kebiasaan yang sudah terjadi akan menyebabkan perpecahan antar bangsa, karena mahar pigura memang tidak ada anjuran dalam hukum Islam, tetapi mahar pigura juga tidak ada larangan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, mahar pigura bukan tidak ada asas manfaatnya, tetapi karena hal ini terasa asing dan hanya berupa adat istiadat, sehingga ketentuan hukum mahar pigura bagi Kepala KUA Kec. KUA Kec. Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir, dan Parenggean tidak memiliki asas manfaat, padahal filosofi mahar pigura memiliki asas manfaat yang bagus dengan mengedepankan kultularisasi antara adat dan agama.

b. Alasan Hukum Setuju terhadap Mahar Pigura

Mahar pigura asas manfaatnya kurang, tetapi melihat dari adat/kebiasaan dari sisi fakor mahar pigura boleh saja dilakukan,¹²⁹ tetapi jika berdasarkan hukum Islam dari Hadis Nabi yang menyatakan “berikanlah mahar kepada calon pengantin perempuan itu walaupun hanya

¹²⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 74.

¹²⁹Maskuni S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga Hulu, wawancara pada hari Rabu 7-Nopember-2018, 09:43 WIB.

dari cincin dari besi”, dari Hadis tersebut jika dilihat dari harga atau isi daripada mahar pigura yang biasanya terjadi dalam setiap pernikahan lebih mahal daripada cincin dari besi.¹³⁰

Mahar uang yang dijadikan pigura boleh saja dilakukan karena sesuai selera masing-masing kedua mempelai, tapi jika mahar pigura berbentuk permanen hanya untuk kenang-kenangan saja, harus ada uang yang sama dan nilai yang sama seperti uang, supaya uang itu bisa dimanfaatkan oleh pihak perempuan, karena mahar itu harus dimanfaatkan.¹³¹

Mahar dalam bentuk pigura kadang-kadang hanya dalam bentuk pajangan saja, sehingga dalam asas manfaatnya kadang tidak bisa di ambil hikmahnya. Harusnya mahar pigura tidak masuk dalam bagian mahar saja, karena misalkan berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan misalkan Rp. 200.000 atau Rp. 300.000 belum lagi bingkainya atau segala macam serta upahnya, sehingga hanya terpajang sebagian rupa. Mahar ini (pigura) sebetulnya nilai manfaatnya juga bagus, seandainya memang ingin di manfaatkan, terkadang sudah di bentuk bingkai tidak ingin membelanjakannya seperti di bingkai sedemikian rupa, lebih baik mahar itu harus mempunyai nilai manfaat yang dalam artian bisa di belanjakan, fungsinya seperti itu kalau dalam bentuk mahar uang. Intinya apapun mahar piguranya asal ada asas manfaatnya sah-sah saja asal tidak

¹³⁰ Ahmad Qusairi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Antang Kalang, wawancara pada hari Senin 5-Nopember-2018, 18:03 WIB.

¹³¹ Surianyah, S. Ag, Kepala KUA Kec. Cempaga, wawancara pada hari Selasa 06-Nopember-2018, 15:29 WIB.

melenceng dari asas manfaatnya seperti mahar menggunakan kerikil, terong, dan lainnya.¹³²

Hal ini bisa dikatakan selama piguranya diucapkan dalam artian nilai piguranya dan maharnya (uang Rp. 500.000+nilai piguranya) disebutkan dalam ijab qabul maka boleh saja dilakukan.¹³³ Intinya selama ada asas manfaatnya seperti kenang-kenangan meraka berdua dan dipajang karena mempunyai sejarah atau cerita kepada anak-anak mereka suatu saat nanti.¹³⁴

Oleh karena itu, mahar pigura tersebut dilihat bukan dari objek maharnya, tapi dalam penyebutannya mahar pigura harus di pakai atau di gunakan, bukan untuk disimpan seperti di museumkan, maka manfaatnya tidak bisa di ambil serta suami boleh menikmati bukan mengambil manfaat dari mahar tersebut.¹³⁵ Mahar harus diserahkan kepada mempelai perempuannya apapun bentuknya asalkan mempunyai manfaat seperti uang, karena dengan adanya mahar uang tersebut bisa di nikmati oleh istrinya secara langsung, sebab yang seperti itu nanti bukan hanya istrinya saja bahkan suami bisa menikmati uang tersebut. Intinya kembali kepada

¹³²Syarip Hadiani, S.Sos.I, Kepala KUA Bapinang, wawancara pada hari Kamis 1-Nopember-2018, 14:25 WIB.

¹³³Ahmad Mulyadi S.H.I., M. H, Kepala KUA Kec. Baamang, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 10:28 WIB.

¹³⁴Rohadi, S.Th.I, Kepala KUA Kec. Bukit Santuai, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:07 WIB.

¹³⁵Muhammad Ikhlas, S. Ag, Kepala KUA Kec. Seranau, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 14:39 WIB.

keihlasan istrinya, mau atau tidak menerima mahar pigura itu, tetapi dengan selain itu lebih bagus lagi.¹³⁶

Peneliti mendukung adanya pendapat para Kepala KUA yang menyatakan bahwa mahar pigura boleh-boleh saja, karena mahar pigura bukanlah barang haram dan mahar pigura tersebut sah-sah saja karena tidak ada unsure larangan dalam kewajiban perkawinan.

Hal ini dinyatakan bahwa selama mahar pigura di ucapkan saat ijab qabul maka sah sudah pernikahannya, karenanya mahar pigura merupakan mahar yan sah-sah saja dilakukan karena tergantung permintaan mempelai perempuannya kepada mempelai laki-laki. Asas manfaat inilah yang bagi peneliti sesuai dengan keberlakuan mahar pigura sebagai landasan hukum kebolehan. Akan tetapi, perlu batasan dalam memberikan mahar pigura karena tidak semua benda bisa dijadikan mahar yang dibingkai seindah mungkin untuk mempelai perempuannya.

Hal ini ditakutkan karena kebolehan dalam menyerahkan mahar pigura sebagai kewajiban calon suami kepada calon istrinya terbukanya jalan keburukan dalam memberikan mahar pigura. Oleh karena itu, perlu ditutupi dengan *saddu adz-dzaria 'ah* dalam membatasi objek mahar pigura yang boleh di jadikan mahar seperti kerikil, pasir, rumah siput, batu bata/baru, dan lainnya melainkan mahar pigura yang boleh digunakan seperti cangkir gelas, piring gelas, motor, bahkan rumah sekalipun boleh di jadikan mahar sebagai mahar pernikahan asalkan semua itu memiliki

¹³⁶ Anwar S.Pd.I, Kepala KUA Kec. Telawang, wawancara pada hari Sabtu 3-Nopember-2018, 13:03 WIB.

asas manfaat bagi istri itu sendiri. Ada beberapa point yang dapat di ambil hikmah dalam di bolehkannya mahar pigura berdasarkan pendapat Kepala KUA yang mendukung mahar pigura, yaitu:

- 1) Adat/kebiasaan yang memang di berlakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyerahkan mahar bagi seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya.
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum agama, di mana mahar bisa saja berbentuk apa saja asalkan dia mempunyai nilai dan asas manfaat bagi pihak perempuannya serta barangnya bukan barang haram baik manfaatnya maupun asalnya.
- 3) Hanya sebagai kenang-kenangan yang kemungkinan besar sebagai keharmonisan rumah tangga jika mahar tersebut di jadikan pigura.
- 4) Peneliti setuju dengan adanya mahar yang dijadikan sebagai hiasan atau pigura kerana mahar yang dijadikan pigura merupakan benda atau barang yang sudah pasti mempunyai nilai atau materi, cuman mahar tersebut hanya di jadikan hiasan atau pigura saja sehingga asas manfaatnya tentu mempunyai nilai tersendiri bagi kedua pasangan suami-istri teruma pihak istri.

Dalam ushul fiqh, adat istiadat adalah '*urf*' merupakan sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹³⁷ Hal ini termasuk dalam mahar pigura yang merupakan '*urf sahih*' yang tidak bertentangan

¹³⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, h. 81.

dengan syara',¹³⁸ karena mahar pigura sudah pasti benda yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, sehingga mahar pigura merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang mereka nilai merupakan sebuah kebaikan asalkan tidak bertentangan dengan syara'.

d. Alasan Hukum Setuju dan tidak Setuju terhadap Mahar Pigura

Biasanya mahar yang berbentuk pigura selalu berbentuk uang yang dibingkai seindah mungkin sesuai selera kedua mempelai masing-masing, sebab terima atau tidak mahar uang yang dijadikan hiasan atau pigura tersebut, kalau dia (mempelai perempuan) menerima dengan apa adanya seperti itu tidak ada perselisihan di kemudian hari, berarti sah ini menjadi mahar. Akan tetapi, seharusnya mahar itu harus dinikmati oleh mempelai wanita, tetapi mereka lebih mementingkan untuk mengingat dengan mahar tersebut sebagai pemberian seorang suami yang dihargai dengan menjadikan uang sebagai mahar pigura atau hiasan.

Rata-rata tidak ada di antara mereka yang tidak setuju, karena jika ditinjau dari hukum asal (munakahat) seharusnya mahar itu yang bisa dinikmati oleh pihak perempuan dan mahar pigura tidak dapat dinikmati secara langsung oleh pihak mempelai perempuan karena mahar itu pemberian seorang laki-laki sebagai lambang mampu dia menikah dengan pemberian mahar, itu tujuanlah awalnya. Akan tetapi, pihak perempuan ingin mengukir pernikahannya sebagai sejarah, mahar tersebut dijadikan hiasan. Hal ini tentu saja melenceng dari makna mahar tersebut karena

¹³⁸*Ibid.*, h. 83.

mahar tersebut hanya dijadikan sebagai hiasan bukan dinikmati atau dimanfaatkan oleh pihak wanitanya.¹³⁹

Intinya silahkan saja melakukan mahar berbentuk pigura sesuai yang dikatakan oleh Kepala KUA Kec. Kota Besi waktu menikah, di mana menggunakan mahar uang yang berbentuk pigura. Akan tetapi, selain diterangkan oleh KUA bahwasanya manfaat mahar ini (pigura), karena disebutkan bahwasanya mahar itu adalah uang senilai Rp. 290.000 sekian, hanya untuk akad nikah dan untuk rangkaian pernikahan. Setelah akad itu uang tersebut silahkan dikeluarkan dan diserahkan ke istrinya karena menjadi hak mutlak si istri.¹⁴⁰

Mahar pigura dari pernyataan kedua KUA di atas, dapat dikatakan bahwa mahar pigura sesuai dengan selera kedua mempelai masing-masing sebelum di laksanakan akad pernikahan. Mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kualifikasi dan klasifikasi mahar. Sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau benda-benda yang tidak konkrit seperti jasa mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya.¹⁴¹

Oleh karena itu, mahar pigura boleh saja dilakukan asalkan dia mempunyai benda yang jelas seperti uang, emas, dan lainnya sesuai dengan asas benda yang bisa dimanfaatkan, maka mahar pigura boleh

¹³⁹ Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

¹⁴⁰ Achmad Junaidi, S.H.I, Kepala KUA Kec. Kota Besi, wawancara pada hari Jum'at 2-Nopember-2018, 16:42WIB.

¹⁴¹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, h. 33.

dilakukan asalkan itu dari permintaan pihak mempelai perempuannya kepada calon mempelai laki-lakinya. Peneliti setuju saja dengan pendapat Kepala KUA yang mengatakan bahwa mahar pigura boleh saja dilakukan asalkan mempunyai benda yang jelas, tetapi peneliti lebih menitikberatkan bahwa mahar pigura lebih baik dilakukan secara terpisah yang palsu (fotokopi) dari benda tersebut di jadikan mahar, sedangkan yang asli di simpan atau di tahan untuk di serahkan secara langsung kepada istrinya.

Mahar pigura dalam segi manfaatnya peneliti tidak setuju dengan pendapat Kepala KUA yang menolak dan kurang setuju terhadap mahar pigura tersebut karena berdasarkan asas manfaatnya memang mahar pigura ini tidak mempunyai nilai apa-apa, maka harus didahulukan masalahnya apakah mempunyai manfaat terhadap istrinya, karena jika mahar pigura tidak dihargai dan tidak ada timbal balik dari pihak perempuan, padahal mahar itu adalah pemberian yang wajib yaitu pemberian yang wajib yang dihargai oleh si istri kepada suami. Hal ini terkadang menjadikan mahar pigura tersebut akan luntur atau hancur, sedangkan mahar itu sebagai penghargaan.

Akan tetapi, peneliti lebih menyetujui pendapat Kepala KUA yang mendukung atau membolehkan mahar pigura sebagai mahar pernikahan baik dari sisi manfaatnya, adat/kebiasaannya, dan hukum pernikahannya sendiri karena apapun bentuk maharnya selama itu berbentuk harta ataupun materialistis yang bisa digunakan pihak wanita maka sah-sah saja mahar pernikahannya, asalkan jangan menggunakan mahar pigura yang berbentuk kerikil, terong, ataupun rumah keong yang dibingkai sebagus mungkin tentu tidak mempunyai asas manfaat dan

terlihat meremehkan pihak wanitanya. Ada dua substansi kriteria bagi peneliti terhadap mahar pigura yang boleh dilakukan, yaitu:

1. Mahar pigura yang dihias dan diperindah sedemikian rupa boleh saja dilakukan asalkan mempunyai nilai mahar tersebut. Nilai dari pigura tersebut diucapkan saat ijab qabul.
2. Mahar pigura yang berbentuk uang atau yang lainnya tidak mesti yang asli, tetapi bisa digunakan dengan fotokopi/duplikat dari mahar tersebut. Mahar pigura yang asli diucapkan saat ijab qabul saja, mahar yang telah di fotokopi/duplikat tidak perlu diucapkan karena saat ijab qabul tidak perlu di perlihatkan mahar tersebut.

Pernyataan di atas peneliti melihat dari hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.¹⁴² Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita masyarakat. Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk

¹⁴² Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Cet. ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006, h. 204

kemanfaatan bagi seluruh orang.¹⁴³ Mahar pigura mempunyai hikmah tersendiri seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi berikut:

- e. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
- f. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukan sebagai pembayaran harga sang perempuan.
- g. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
- h. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki (suami) karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini oleh karena itu wajarlah jika laki-laki yang membayar mahar karena ia memperoleh hak seperti itu, dan di sisi lain ia akan lebih bertanggung jawab serta tidak semena-mena menghancurkan rumah tangga hanya karena masalah sepele.¹⁴⁴

Pada prinsipnya, mahar itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mereduksikan mahar hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang

¹⁴³Shidarta Dardji Darmohardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, h. 155.

¹⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, h. 478.

dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istrilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.¹⁴⁵

Hal ini bagi peneliti mahar pigura yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan asas manfaat, adat/kebiasaan, dan hukum pernikahan itu sendiri yang mencakup asas perkawinan baik secara sosial, agama, dan hukum perkawinan Indonesia dengan tujuan menjunjung tinggi kewajiban pihak suami dan penghormatan pihak istri. Intinya dalam segi manfaat peneliti memandang mahar pigura tidak harus digunakan dengan subjek aslinya melainkan hanya pengucapan saja saat nikahnya, tetapi peneliti tetap mendukung adanya mahar pigura sebagai mahar karena meskipun mahar pigura memakan banyak biaya pembentukannya asalkan kedua belah pihak setuju dan tidak ada permasalahan tentang mahar pigura, bagi peneliti sendiri mempunyai sisi manfaatnya, adat/kebiasaan, dan hukum munakahatnya mempunyai keabsahan pernikahan itu sendiri.

¹⁴⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 74.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum mahar dalam bentuk pigura dalam perspektif 13 KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur ada yang mendukung, kurang setuju, dan menolak mahar figura. Kepala KUA yang mendukung mahar figura ini karena mahar tersebut tidak ada larangan dan tidak ada anjuran untuk melakukannya tetapi *mubah* untuk melaksanakannya selama calon mempelai perempuannya tidak memintanya dan tidak mempermasalahkan mahar tersebut. Kepala KUA yang kurang mendukung mahar figura ini karena kurang ada asas manfaatnya kecuali mahar memiliki asas manfaat bagi calon mempelai perempuannya meskipun hanya sebagai bingkai pajangan rumah. Kepala KUA yang tidak mendukung adanya mahar figura ini mereka beralasan bahwa mahar figura ini sama sekali tidak ada asas manfaatnya sama sekali, sehingga mahar tidak bisa digunakan dan dinikmati oleh istrinya bukan untuk menjadi hiasan atau pajangan saja.
2. Alasan hukum masing-masing Kepala KUA se-Kabupaten Kotawaringin Timur baik yang mendukung, kurang setuju, bahkan menolak terhadap mahar yang berbentuk figura ini karena berbeda dalam pandangan asas manfaatnya. Kepala KUA yang mendukung maupun yang kurang setuju dengan adanya mahar figura karena mahar mereka berpandangan ketika ijab qabul dikatakan bahwa mahar figura dan ada nilai maharnya, maka mahar figura boleh saja dilakukan, sedangkan Kepala KUA yang menolak mahar tersebut berpendapat

bahwa mahar figura tidak ada asas manfaatnya baik dari segi filosofinya maupun segi materealistisnya, karena mahar tersebut harus dinikmati dan digunakan oleh istri bukan untuk disimpan dan dijadikan pajangan. Akan tetapi mereka tetap menerima mahar figura tersebut dikarenakan kedua calon mempelai sudah menyepakati mahar tersebut.

B. Saran

1. Mahar yang berbentuk pigura seharusnya tidak boleh digunakan secara penuh seperti uang asli yang kemudian dibingkai sedemikian rupa baik berbentuk hati, tanggal, bulan, tahun, dan lainnya yang bagi peneliti sendiri tidak memiliki asas manfaatnya bagi istrinya di kemudian hari. Mahar berbentuk pigura ini seharusnya tidak digunakan dengan benda aslinya tapi cukup dengan fotokopiannya saja, sehingga uang yang telah difotokopi sebagai bentuk mahar figura tersebut berguna sebagai pengalihan mahar aslinya (uang) yang bisa dinikmati oleh istri.
2. Peneliti mendukung adanya mahar pigura ini dikarenakan mahar figura ini tidak bisa kita pisahkan dengan adat/kebiasaan yang sudah berlaku bagi masyarakat sekitar, sehingga mahar pigura ini bagi peneliti sendiri memiliki asas manfaat dan adat istiadat yang harus ditimbang baik buruknya karena mahar figura ini tidak dilarang dan tidak juga di anjurkan, sehingga apabila mahar figura ini memiliki asas manfaat dalam pernikahan dalam kehidupan rumah tangga, maka mahar pigura sah-sah saja dilaksanakan asalkan kedua belah pihak tidak setuju dan tidak mempermasalahkan mahar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990.
- Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- , *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aris Nur Qadar Ar Razak, "Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)" Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Hukum Islam, Yogyakarta tahun 2015.
- Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Azis, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukium Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. \
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-,Alamiyah, tth.
- Darmohardjo, Shidarta Dardji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan", *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 April 2016.

<http://bappeda.kotimkab.go.id/index.php/2015/06/09/kabupaten-kotawaringin-timur/>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kotawaringin_Timur#cite_note-bps-3, di akses pada hari Kamis 6 September 2018.

<http://dpmpstsp.kotimkab.go.id/portal/blog/2018/03/gambaran-umum-kabupaten>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018.

<http://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html?showall=1&limitstart=>, di akses pada hari Kamis 6 September 2018.

Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, terj. Rusnan Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).

-----, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, terj. Abu Fahmi Huadi dan Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz 2.

Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, Cet. ke 3, Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.

Lemhanas, *Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.

Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat" Tesis Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016.

Mudjia Raharjo, "Penelitian Sosiologis Hukum Islam", Minggu, 28 Februari 2010.

- Muhammad Asy-Syarbaini Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Babyl Halabi, t.th.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam*, Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: P.T. Sari Agung, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Badan PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in*, Semarang:
Toha Putra, tth.

